TABLOID
SinarTani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)
www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id
www.sinartani.co.id

Edisi 22 - 28 Oktober 2025
No. 4107
Tahun LVI



9 Susu, Komponen Utama MBG Anak Sehat Peternak Sejahtera

10 Tinggalkan Dunia Perbankan, Dwi Bangun Bisnis Durian Endule

13 Peringatan HPS ke-80 Konversi Lahan Pertanian, Ancaman di Depan Mata



KIOS PUPUK ‘NAKAL’



EDITORIAL

Kios Pupuk dan Serapan Pupuk

Pemerintah kini tengah membenahi tata kelola pupuk subsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi yang sebelumnya memenuhi prinsif 6T yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu dan Tepat Mutu, kini ditambah menjadi 7T yakni dengan penambahan Tepat Penerima.

Namun di tengah upaya pemerintah memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, saat musim tanam Oktober 2025-Maret 2026, pemerintah justru mengungkap adanya dugaan dari total 27.319 kios pupuk di Indonesia, terdapat 2.039 kios yang terbukti menjual di atas HET.

Kios-kios tersebut tersebar di 285 kabupaten/kota pada 28 provinsi. Konsentrasi pelanggaran tertinggi di wilayah sentra pangan yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Data Kementerian Pertanian, rata-rata selisih harga di tingkat kios mencapai Rp20.800 per sak Urea dan Rp20.950 per sak NPK.

Berdasarkan SK Kementerian Pertanian, pemerintah telah menetapkan harga Pupuk Rp 2.250/kg atau Rp 112.500/sak (50 kg), Pupuk NPK Rp 2.300/kg atau Rp 115.000/sak, Pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300/kg atau Rp 165.000/sak, Pupuk ZA Rp 1.700 /kg atau Rp 85.000/sak dan Pupuk Organik Rp 800 atau Rp 32.000/sak (40 kg).

Keluhan petani terhadap harga pupuk yang berada di atas HET memang kerap mencuat saat musim tanam tiba. Terlepas adanya kios pupuk yang memang nakal mempermainkan harga pupuk subsidi, jika ditelusuri, maka ada beberapa penyebab harga pupuk subsidi di atas HET.

Misalnya, biasanya harga pupuk subsidi di atas HET karena kios memasang tarif untuk biaya pengiriman sampai lokasi. Apalagi sebelum 1 Oktober 2025, margin fee untuk kios memang terbilang sangat kecil hanya Rp 75/kg. Secara kalkulasi bisnis, memang margin sebesar itu tidak bisa menutupi jika kios pupuk harus mengirim barang ke petani atau kelompok tani. Namun sejak 1 Oktober lalu, pemerintah telah menaikkan menjadi Rp 144/kg. Kenaikan ini diharapkan dapat mengurangi praktik penjualan di atas HET.

Harga pupuk subsidi berada di atas HET karena penebusan pupuk subsidi dilakukan bersama kelompok tani. Biasanya kelebihan harga tersebut dimasukkan dalam kas kelompok tani. Apalagi lokasi kios pupuk cukup jauh dari tempat petani.

Melihat kasus di lapangan, adanya harga pupuk subsidi yang dijual di atas HET memang perlu ditelusuri secara detail dan clear. Pasalnya, jangan sampai kasus tersebut kemudian berimbas, bahkan mengganggu ketersediaan pupuk subsidi di petani yang kini tengah bersiap memasuki musim tanam.

Apalagi di sisi lain, data Pupuk Indonesia menyebutkan petani di sejumlah daerah selama musim tanam sebelumnya justru belum menebus pupuk subsidi. Sampai Agustus masih terdapat 6,89 juta dari 14,91 juta petani atau 46,2% yang terdaftar di e-RDKK belum menebus pupuk subsidi. Sementara pada tahun 2024 terdapat 2,98 juta dari 14,67 juta petani atau 20% petani yang terdaftar e-RDKK belum menebus pupuk subsidi.

Sedangkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 28 September 2025 baru mencapai 62,2% dari alokasi kontrak dan 58,8% dari alokasi Keputusan Menteri Pertanian terhadap realokasi menjadi sebesar 9,55 juta ton. Sedangkan stok hingga 28 September 2025 untuk urea sebanyak 925 ribu ton, ZA 49 ribu , NPK 649 ribu ton dan Organik 56 ribu ton.

Pertanyaannya apakah kasus kios yang menjual pupuk subsidi di atas HET secara langsung berdampak pada serapan pupuk subsidi yang belum maksimal? Ataukah ada faktor lain.

M[illegible]TAN MENYAPA



Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RI

Jangan Mainkan Pupuk untuk Petani

Kita telah membahas bagaimana distribusi pupuk, bagaimana pengadaan pupuk kelancarannya untuk petani Indonesia selama ini satu tahun terakhir. Alhamdulillah pupuk sudah lancar Regulasinya yang mengikat 145 itu sudah dicabut. Kemudian juga ada 12 kementerian dulu yang harus paraf, baru pupuk bisa tiba di lapangan, lalu ditambah 38 gubernur dan 514 bupati/walikota se-Indonesia paraf, baru petani baru bisa menerima pupuk

Bapak Presiden telah memerintahkan pupuk subsidi langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia, kemudian ke petani. Alhamdulillah hal ini sudah kita selesaikan. Sekarang petani sudah senang. Tetapi masih ada keluhan petani-petani seluruh Indonesia.

Kami temukan ada 2.039 kios, distributor, pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut. Tapi yang menganggap bahwa mereka benar, boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Hal ini tidak boleh terjadi. Kami melihat ini permainan sudah lama.

Selama satu tahun terakhir yang kami sudah cabut ijinnya ada 30-an kios dan distributor. Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia, ternyata ribuan. Estimasi kami kerugian petani, bisa mencapai Rp 600 miliar per tahun. Itu yang ketahuan, bagaimana dengan yang tidak ketahuan. Kalau 10 tahun, bisa mencapai Rp 6 triliun.

Kasian petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita dan jumlah petani padi mencapai 116 juta, itu yang harus kita jaga, termasuk keluarganya. Mereka ujung tombak pertanian, mereka pahlawan pangan kita.

Kita lihat sekarang. Alhamdulillah atas gagasan Bapak Presiden mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan mimpi kita swasembada pangan jadi kenyataan. Dari target awal itu 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini menjadi kenyataan. Ini mimpi besar kita, sehingga segala kekurangan kita harus perbaiki.

Kedua, mudah-mudahan kedepan manajemen pupuk semakin membaik. Pupuk kalau pada manusia adalah darahnya. Pertanian tanpa pupuk kita tidak bisa tingkatkan produksi. Sekali lagi, saya tegaskan 2.039 kios pupuk yang menjual pupuk di atas HET, ijinnya dicabut.

Dari laporan, kios pupuk telah menaikan harga pupuk subsidi rata-rata 18-20% dari HET. Ini tidak boleh lagi terjadi. Kami akan periksa dan investigasi ke bawah. Kami akan turunkan tim untuk mengecek dan bukti-buktinya ada. Terpenting kita tindak tegas. Jadi Insyaallah pupuk semakin membaik.

Bahkan kini ada yang menarik di lapangan, distributor yang mengejar petani karena pupuknya melimpah tersedia dan mudah. Sekarang ini total pupuk subsidi yang pemerintah sediakan sebanyak 9,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 5,9 juta ton yang sudah terserap petani. Jadi dari sisi stok cukup aman.

Tetapi kalau masih ada yang bermain-main menaikan harga dan merugikan petani, kami akan bertindak tegas. Perintah Bapak Presiden yang 'bermain-main' di sektor sarana produksi harus diberesin. Nantinya, kios pupuk yang kita cabut ijinnya bisa diganti Kopdes Merah Putih. Kopdes nantinya bisa langsung menyalurkan ke petani.

SAUNG TANI



Pemerintahan Presiden Prabowo telah 1 tahun
- Masih banyak PR ya pak?

Dunia peringati Hari Pangan pada 16 Oktober
- Kok sepi sepi aj di Tanah Air

Presiden intruksikan revitalisasi pabrik pupuk
- Pasti selama ini 'ada apa-apanya'

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.



Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Freepik.com (diolah)

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter**: Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan** : Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari
Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris Utama: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; **Komisaris:** Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS
Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menpen/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. No rekening 1270096016587; Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI'46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586;
Percetakan: PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

Rahasia Sukses Produk Ternak: Branding, Kemasan dan Konsistensi



Produk ternak lokal kini tak kalah saing. Rahasianya bukan sekadar rasa dan harga, tapi bagaimana peternak membangun citra lewat branding, kemasan menarik, dan konsistensi mutu yang terjaga.

Persaingan di sektor peternakan kini tak lagi berhenti pada urusan produksi. Ketika daging, telur, susu, hingga pupuk organik membanjiri pasar, tantangan berikutnya adalah bagaimana produk-produk itu bisa dikenali, dipercaya, dan dipilih konsumen. Branding dan pemasaran menjadi kunci agar hasil ternak tidak hanya laku, tapi juga bernilai.

Kekuatan cerita menjadi fondasi dalam membangun merek produk ternak. Konsumen modern cenderung tertarik pada produk yang memiliki narasi: bagaimana hewan dipelihara, dari mana asal pakan, atau seperti apa dampak usaha itu bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pendekatan ini membuat produk memiliki nilai emosional. Misalnya, telur ayam kampung yang dipasarkan dengan label "bebas antibiotik" dan "pakan alami" tidak hanya bicara soal gizi, tetapi juga gaya hidup sehat. Cerita tentang proses yang bersih, jujur, dan ramah lingkungan dapat menciptakan kepercayaan tanpa perlu kampanye besar-besaran.

Konsumen masa kini membeli bukan sekadar produk, tetapi juga nilai. Saat cerita itu disampaikan secara konsisten, merek menjadi lebih mudah diingat. Inilah langkah awal membangun keunggulan di pasar yang penuh pilihan.

Branding Kemasan

Strategi branding paling efektif adalah dengan mengubah produk mentah menjadi produk olahan bernilai tambah. Setiap proses pengolahan memberi peluang baru dalam branding. Nama produk, bentuk kemasan, hingga cara promosi dapat disesuaikan dengan target pasar. Misalnya, susu kambing dalam botol kecil dengan label modern bisa menarik pasar muda perkotaan yang peduli gaya hidup sehat.

Produk olahan juga lebih mudah dipasarkan karena daya simpannya lebih lama dan tampilannya lebih menarik. Peternak yang mampu naik ke tahap ini biasanya lebih stabil secara ekonomi dan tidak tergantung pada fluktuasi harga bahan mentah.

Limbah ternak yang dulunya dianggap tidak berguna kini justru menjadi peluang bisnis baru. Pupuk organik dari kotoran sapi, ayam, atau kambing semakin diminati petani hortikultura dan penghobi tanaman.

Branding untuk pupuk organik bisa menekankan nilai lingkungan yang ramah tanah, bebas bahan kimia, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Pengemasan kecil 1–2 liter memudahkan distribusi ke pasar ritel dan toko pertanian. Promosi lewat komunitas urban farming dan media sosial menambah daya jangkau produk.

Selain menambah pendapatan, produk pupuk juga memperkuat citra peternakan yang menerapkan konsep zero waste. Hal ini selaras dengan tren pertanian modern yang berorientasi pada ekonomi sirkular.

Di sisi lain, banyak produk ternak lokal sebenarnya berkualitas, namun kalah bersaing karena tampilan dan kemasannya tidak menarik. Padahal, kemasan adalah kesan pertama yang menentukan minat beli. Desain sederhana namun rapi, mencantumkan logo, nama peternakan, tanggal produksi, dan informasi gizi sudah cukup untuk menunjukkan profesionalitas.

Untuk produk daging dan telur, tampilan bersih dan informatif lebih disukai. Sedangkan produk turunan seperti susu pasteurisasi, yoghurt, atau pupuk organik cair bisa menonjolkan kesegaran dan ramah lingkungan melalui warna dan desain yang segar.

Pengemasan juga menjadi alat komunikasi visual antara produsen dan konsumen. Konsistensi warna, logo, dan gaya desain akan memperkuat citra merek. Ketika kemasan terlihat rapi dan higienis, kepercayaan terhadap isi produk pun meningkat.

Digitalisasi Peternakan

Transformasi digital membuka peluang besar bagi peternak untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kini, promosi tidak lagi bergantung pada spanduk atau bazar, melainkan lewat media sosial dan marketplace.

Platform seperti Instagram, TikTok, hingga e-commerce agribisnis bisa menjadi etalase digital yang efektif. Foto berkualitas tinggi, video pendek proses produksi, hingga testimoni pelanggan memperkuat kehadiran merek di ruang online. Selain promosi, platform digital juga bisa dipakai untuk mengatur sistem pre-order, melacak distribusi, dan mengukur minat konsumen.

Keberadaan QR code di kemasan yang menampilkan asal ternak atau proses produksi menambah transparansi dan membangun kredibilitas. Semakin terbuka informasi yang diberikan, semakin besar pula peluang untuk dipercaya.

Brand yang kuat tidak lahir dari kerja sendiri. Kolaborasi antarpeternak dapat memperluas jaringan, menekan biaya promosi, dan meningkatkan daya saing. Melalui koperasi atau gabungan kelompok ternak, produsen bisa membangun merek kolektif dengan standar mutu yang sama.

Langkah berikutnya adalah sertifikasi. Label halal, bebas antibiotik, organik, atau higienis bukan sekadar simbol, tetapi bukti keandalan produk di mata pasar. Sertifikasi juga membuka akses ke konsumen institusional seperti hotel, restoran, dan ritel modern yang menuntut standar tertentu.

Pemerintah dan lembaga pendamping peternak mulai mendorong pelaku usaha ternak agar memperhatikan aspek mutu dan legalitas. Pendampingan branding, pengemasan, dan pemasaran kini menjadi bagian dari pelatihan yang ditujukan agar peternak tidak hanya produktif, tetapi juga kompetitif.

Branding bukan pekerjaan sekali jadi. Ia dibangun melalui konsistensi mutu dan pelayanan. Produk yang selalu segar, bersih, dan sesuai janji akan menciptakan pengalaman positif bagi konsumen. Dari situ lahir kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal utama dalam pemasaran jangka panjang.

Keberhasilan branding juga ditentukan kemampuan menjaga hubungan dengan pelanggan. Komunikasi yang terbuka, respons cepat terhadap keluhan, serta inovasi berkelanjutan akan memperkuat posisi merek di pasar. Peternak yang memahami pentingnya kepercayaan biasanya lebih mudah memperluas pasar tanpa biaya promosi besar.

Konsumen yang puas akan menjadi promotor alami yang merekomendasikan produk ke orang lain. Membangun merek berarti membangun nilai dan kepercayaan. Dari situ, peternak bisa naik kelas, dari sekadar penjual hasil ternak menjadi penggerak agribisnis yang berdaya saing.

Penulis : Edy Puspito
Penyuluh Pertanian Pusat

Negeri Bollywood Ubah Limbah Teh jadi Bahan Bakar

CATATAN Begawan



Hebat dan inovatif. Itu yang dilakukan peneliti di Universitas Sains dan Teknologi Meghalaya, India yang mampu mengubah limbah teh menjadi bahan bakar terbarukan menggunakan nanoteknologi.

Dalam langkah yang luar biasa menuju inovasi energi berkelanjutan, para ilmuwan dari Universitas Sains dan Teknologi Meghalaya (USTM) telah berhasil menghasilkan bioetanol dari limbah daun teh menggunakan nanoteknologi.

Penelitian inovatif, yang diterbitkan dalam *Nature springer* jurnal Konversi Biomassa dan *Biorefinery* (2025), menyajikan proses ramah lingkungan yang mengkonversi teh limbah menjadi bahan bakar terbarukan,bahkan yang pertama di India.

Studi tersebut berjudul "Produksi dan Karakterisasi Bioetanol dari Daun Camellia sinensis yang Dipakai Menggunakan Nanokatalis Heterogen" dipimpin Dr. Shruti Sarma dari Departemen Kimia dan Dr. Rajib Saha dari Departemen Fisika di USTM.

Pekerjaan mereka menawarkan solusi yang menjanjikan untuk dua masalah global yang mendesak yakni keberlanjutan energi dan pengelolaan limbah pertanian.

Camellia sinensisDaun (teh), para peneliti mengekstrak minyak dari biomassa kering dan mengubahnya menjadi bioetanol - biofuel terbarukan yang bersih dan terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil.

Inovasi ini terletak pada penggunaan nanokatalis besi-seng oksida (Fe-ZnO) baru dan teknik bantuan *microwave*. Nanokatalis, dengan reaktivitas tinggi dan luas permukaan yang besar, mempercepat reaksi kimia, membuat proses lebih cepat dan lebih efisien.

Dalam penelitian ini, nanokatalis Fe-ZnO mencapai hasil bioetanol yang mengesankan sebesar 75%, mengubah limbah teh menjadi *biofuel* berkualitas tinggi hanya dalam satu hingga dua jam - peningkatan yang signifikan atas metode tradisional. Nilai kalori bioetanol ditemukan 24,01 MJ / kg, menunjukkan potensi energi yang kuat sebanding dengan biofuel standar.

"Penelitian ini membuka jalan bagi daerah penghasil teh seperti Assam dan Meghalaya untuk mengeksplorasi produksi bioetanol dari limbah teh," kata Dr. Saha. "Ini selaras dengan visi India untuk circular economy dan masa depan energi yang lebih bersih," tambahnya.

Penelitian ini didukung Departemen Kimia dan Fasilitas Instrumen Pusat ASTM, dengan bantuan dari IIT Guwahati dan Universitas Tezpur untuk pengujian analitis. Terobosan ini mencerminkan potensi Timur Laut untuk memimpin revolusi biofuel India, menunjukkan bahwa limbah daun teh suatu hari nanti bisa membantu ketersediaan bahan bakar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sumber : EastMojo.com

KIOS PUPUK 'NAKAL'



Oktober menjadi bulan penting bagi petani. Saat itulah mereka tengah mempersiapkan kembali untuk menanam padi. Berbagai persiapan pun dilakukan, dari mulai mengolah sawah, menyiapkan benih hingga pupuk. Namun ketika petani tengah siap turun ke sawah, mereka dikagetkan dengan kabar ribuan kios pupuk terkena kasus.

Keluhan petani yang kerap mendapatkan pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) memang selalu terdengar saat memasuki musim tanam tiba. Data Kementerian Pertanian, rata-rata selisih harga di tingkat kios mencapai Rp20.800 per sak Urea dan Rp20.950 per sak NPK. Selisih tersebut memberatkan petani dan berpotensi menurunkan daya beli serta margin usaha tani di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas produksi dan harga pangan nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Pertanian, dari total 27.319 kios pupuk di Indonesia, terdapat 2.039 kios yang terbukti menjual di atas HET. Kios-kios tersebut tersebar di 285 kabupaten/kota pada 28 provinsi, dengan konsentrasi pelanggaran tertinggi di wilayah padat aktivitas pertanian seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung.

Laporan pelanggaran harga ini dihimpun melalui sistem pelaporan digital Kementan yang telah diverifikasi dan dianalisis secara menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pelanggaran terekam secara transparan dan dapat segera ditindaklanjuti.

Cabut Ijin

Sebagai tindak lanjut penemuan harga pupuk di atas HET, Pemerintah akan menindak 2.039 kios pupuk yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah melindungi petani dari praktik curang dalam distribusi pupuk bersubsidi.

"Hari ini kami umumkan bahwa izin 2.039 kios tersebut akan dicabut. Ini tidak boleh terjadi. Permainan seperti ini sudah berlangsung lama, setidaknya dalam satu tahun terakhir. Namun, bagi pihak yang merasa benar, dipersilakan menyampaikan klarifikasi kepada Direksi," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (13/10).

Amran menegaskan, jika praktik seperti ini tidak segera dihentikan, maka dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian besar bagi petani. Pemerintah kata Amran, akan terus memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah permainan harga yang merugikan petani.

"Kami mencabut izin 2.039 kios yang menjual di atas HET. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Jadi tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani," tuturnya.

Bahkan ia menegaskan, tidak boleh ada ruang bagi siapapun untuk bermain dengan subsidi pupuk. Sebab, pupuk bersubsidi merupakan instrumen vital negara untuk menjaga produktivitas dan menurunkan biaya produksi petani. "Kami bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum akan menindak tegas setiap oknum kios atau distributor yang menjual di atas HET. Negara tidak boleh kalah oleh praktik curang yang merugikan petani," ujarnya.

Secara khusus Kementan juga memperluas pengawasan ke seluruh 285 kabupaten/kota dengan laporan penyimpangan harga, terutama di 10 provinsi utama penghasil pangan nasional. Fokus pengawasan meliputi pemeriksaan izin kios, validasi data penebusan, serta rekomendasi pencabutan izin bagi penyalur yang terbukti melanggar HET.

"Kalau ada kios yang terbukti bermain harga, langsung kami cabut izinnya. Kami juga bekerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan memberi efek jera," tegas Amran.

Meski akan ada pencabutan ijin usaha, Amran memastikan tindakan ini tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan. Pada tahun ini, Pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025.

"Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran," tuturnya.

Pupuk Indonesia Ambil Langkah

Sementara itu, Direktur Utama PIHC Rahmad Pribadi menegaskan komitmen perusahaan untuk menindak tegas setiap pelanggaran oleh kios penyalur. PIHC bersama Kementan kini memperkuat pengawasan berbasis digital dan pelaporan real time untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan transparan dan akuntabel.

"Siapapun yang melanggar akan kami tindak tegas. Sistem kami sudah digital, sehingga pelanggaran dapat langsung terdeteksi dan ditindak," ujarnya. Bahkan Pupuk Indonesia juga tengah menyiapkan langkah meliputi penutupan sistem secara otomatis bagi kios yang terindikasi menjual di atas HET, pemeriksaan lapangan dan pemasangan plakat peringatan di kios yang diperiksa, hingga penutupan permanen terhadap kios yang terbukti melanggar.

"Kalau satu kecamatan ada kios yang ditutup, kami akan memastikan petani tetap bisa menebus pupuk di kios terdekat di kecamatan lain. Prinsipnya, pelayanan kepada petani tidak boleh terganggu," kata Rahmad.

Data Pupuk Indonesia realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi Nasional hingga 11 Oktober 2025 menunjukkan capaian yang positif dan terkendali. Berdasarkan data PT Pupuk Indonesia, penyaluran pupuk bersubsidi dari total alokasi Kementan sebesar 9,55 juta ton, capaian penebusan mencapai 5,95 juta ton atau sekitar 62,34 persen dari total alokasi.

Dengan penegakan hukum yang tegas, Rahmad mengatakan, tahun ini penyerapan pupuk meningkat 12 persen dibandingkan tahun lalu. Bahkan, diikuti dengan kenaikan produksi beras sebesar 16 persen berdasarkan data BPS. "Artinya, kebijakan tegas terbukti tepat. Semakin kuat penegakan hukumnya, semakin tinggi pula produktivitas pertanian," kata Rahmad.

Langkah tegas ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk memastikan kebijakan pupuk bersubsidi berjalan adil, transparan, dan berpihak pada petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. **Yul**

Data e RDKK

Kunci Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Sesuai target swasembada pangan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo, Kementerian Pertanian melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya melalui pengelolaan pupuk subsidi bagi petani. Kuncinya adalah perencanaan dari data e RDKK.

Pupuk bersubsidi menjadi sarana produksi utama yang berperan penting dalam menjaga produktivitas pertanian nasional. Program ini menjangkau 14 juta petani di 5.995 kecamatan, 482 kabupaten, dan 37 provinsi, sehingga pengelolaannya menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, auditor, serta aparat penegak hukum.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana. Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, Andi Nur Alam Syah menjelaskan, pada Tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton. Hingga 10 Oktober 2025, realisasi penyalurannya telah mencapai 62,06%, sehingga masih tersedia ruang untuk mempercepat distribusi. Diperlukan langkah konkret agar pupuk benar-benar tersalurkan sepenuhnya dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Andi Nur menegaskan tata kelola pupuk bersubsidi kini semakin transparan, berjenjang, dan berbasis sistem. Langkah ini ditempuh untuk memastikan penyaluran pupuk benar-benar tepat sasaran serta bermanfaat langsung bagi petani. Penyaluran pupuk bersubsidi menurutnya, wajib memenuhi prinsip Tujuh Tepat: jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.

Data e RDKK

Karena itu, perencanaan kebutuhan pupuk 2026 melalui sistem eRDKK menjadi kunci agar petani dapat memperoleh pupuk tepat waktu dan sesuai kebutuhan. “Pendataan eRDKK yang akurat akan menentukan keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi,” kata Andi Nur Alam Syah, Kamis (16/10).

Ia menjelaskan, alur tata kelola pupuk bersubsidi dimulai dari tahap perencanaan, yakni melalui pendataan petani penerima dan kebutuhan pupuk lewat e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang, mulai dari penyuluh lapangan, koordinator penyuluh, kepala seksi, kepala bidang penyuluhan, hingga Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota. Seluruh mekanisme ini dijalankan melalui sistem yang terintegrasi.

Ia menambahkan, penetapan alokasi dan realokasi pupuk juga dilakukan secara bertingkat. Pemerintah pusat menetapkan alokasi melalui Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan), lalu diturunkan ke tingkat provinsi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi, hingga ke kabupaten/kota oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. “Mekanisme berlapis ini menjadi bagian dari pengendalian dan validasi agar distribusi pupuk semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Berdasarkan aturan terbaru, pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan telah terdaftar di e-RDKK. Syarat lainnya adalah petani memiliki lahan maksimal seluas 2 ha, termasuk yang tergabung dalam LMDH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Komoditas yang mendapatkan subsidi pun masih mencakup tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu, serta hortikultura meliputi cabai, bawang merah, dan bawang putih. Untuk sektor perkebunan, pupuk subsidi dialokasikan pada komoditas kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Dari sisi ketersediaan, Andi memastikan stok pupuk sangat mencukupi untuk Musim Tanam I (Oktober–Maret/Okmar). Hingga 24 September 2025, realisasi penyaluran baru mencapai 57,98% atau sekitar 5,54 juta ton, sehingga pupuk di lapangan masih tersedia dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan petani.

“Pemerintah berkomitmen penuh memastikan pupuk bersubsidi diterima petani yang berhak. Melalui sistem e-RDKK dan verifikasi berjenjang, distribusi dapat berjalan tepat sasaran. Dengan stok yang cukup untuk musim tanam, kami optimis kebutuhan petani terpenuhi dan produksi pertanian terus meningkat,” ujar Andi.

Data petani yang terdaftar dalam e-RDKK juga telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) serta data kependudukan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, sehingga keabsahan data penerima dapat dipastikan berdasarkan NIK dan alamat.

Sementara itu, Direktur Pupuk Ditjen PSP, Jekvy Hendra menegaskan pentingnya percepatan dan ketepatan pendataan kebutuhan pupuk agar distribusi tahun depan berjalan lancar. Ia meminta penyusunan eRDKK benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini, pemutakhiran data eRDKK dapat dilakukan sepanjang tahun, sehingga akurasi dan validitas data tetap terjaga.

Jika pendataan eRDKK 2026 berjalan lancar, maka seluruh SK Alokasi Pupuk Bersubsidi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dapat terbit sebelum 31 Desember 2025. Dengan begitu, petani sudah bisa menebus pupuk mulai 1 Januari 2026, tanpa kekhawatiran kekurangan pupuk.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Kemenko Pangan , Bona Kusuma menyampaikan, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai kemandirian pangan.

“Baru di era Presiden Prabowo Subianto, fokus terhadap swasembada pangan dijalankan secara nyata. Sebanyak 145 peraturan telah disinkronkan untuk memperkuat dan sinergi dalam tata kelola pupuk bersubsidi,” jelas Bona.

Ia menambahkan, implementasi Perpres No. 06 Tahun 2025 telah berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap sistem distribusi pupuk nasional. “Esensi dari Pupuk bersubsidi ini sebagai komponen kunci dari komitmen Pemerintah Indonesia mencapai Swasembada Pangan,” ujar Bona.

Melalui Perencanaan Kebutuhan Pupuk 2026, Kementan mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, penyuluh, hingga kelompok tani untuk memperkuat sinergi, memperbarui data secara akurat, dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak.

Dengan tata kelola yang akuntabel dan stok yang memadai, Kementan berharap petani lebih tenang menghadapi musim tanam. Produktivitas pertanian pun diyakini akan terus tumbuh, memperkuat ketahanan pangan nasional. **Yul**

REALISASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI NASIONAL

REALISASI SALUR (per 26 September 2025)

NO	JENIS PUPUK	ERDKK 2025 (TON)	ALOKASI (TON)	REALISASI			SISA KETERSEDIAAN ALOKASI (TON)
				VOLUME (TON)	%		
					Terhadap eRDKK	Terhadap Alokasi	
1	UREA	5.536.250	4.557.178	2.638.659	47,66	57,90	1.918.519
2	NPK	7.419.305	4.268.096	2.752.067	37,09	64,48	1.516.029
3	NPK Formula Khusus	173.738	131.620	46.257	26,62	35,14	85.364
4	ZA*)	13.202	93.106	873	6,61	0,94	92.233
5	Organik	1.680.771	500.000	156.912	9,34	31,38	343.088
JUMLAH		**14.823.266**	**9.550.000**	**5.594.768**	**37,74**	**58,58**	**3.955.232**

Jumlah Petani eRDKK 2025 yang telah disahkan oleh Kadistan:
14.969.691 NIK sedang sampai 26 September 2025 petani yang sudah melakukan penebusan pupuk sebanyak 8.816.429 NIK (58,90 %)

Kios Pupuk Wajib Pasang Stiker HET

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan petani di seluruh Indonesia menjelang musim tanam. Dengan dukungan kapasitas produksi yang besar, jaringan distribusi luas, serta sistem tata kelola baru yang lebih efisien, perusahaan pelat merah ini siap menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke titik serah terakhir.

Vice President Manajemen Stakeholder PT Pupuk Indonesia, Frans Adisuranta Ginting mengatakan, selain menjamin ketersediaan stok, Pupuk Indonesia juga menekankan pentingnya penyaluran pupuk sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Karena itu, setiap kios dan titik serah wajib memasang stiker HET yang jelas dan mudah dilihat.

Frans mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan HET. Pupuk bersubsidi wajib dijual sesuai harga resmi agar tidak membebani petani. Ia meminta semua pihak di lapangan untuk segera melaporkan bila ada pelanggaran harga atau kios resmi yang tidak memasang stiker HET.

"Jika ada harga pupuk subsidi di atas HET, biasanya karena kios memasang tarif untuk biaya pengiriman sampai lokasi atau kadang penembusan bersama kelompok. Biasanya ada kas dalam kelompok," tuturnya.

Saat ini, Pupuk Indonesia mengoperasikan lima pabrik utama yang tersebar di Aceh, Palembang, Cikampek, Gresik, dan Bontang, dengan kapasitas produksi mencapai 2,86 juta ton per tahun. Kapasitas besar ini diperkuat 509 unit gudang penyimpanan yang tersebar di berbagai wilayah dan dipilih secara strategis agar dekat dengan Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dan Penerima Pada Titik Serah (PPTS), guna meminimalkan biaya logistik.

Saat ini terdapat 1.030 Pelaku Usaha Distribusi (PUD) dan 26.459 Penerima Pada Titik Serah (PPTS) yang menjadi mitra utama dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. "Kami memastikan stok pupuk aman, baik untuk urea maupun NPK. Hingga 28 September 2025, stok urea tercatat 925 ribu ton dan NPK mencapai 649 ribu ton. Jumlah ini jauh di atas *safety stock* nasional dan cukup untuk mendukung musim tanam di seluruh provinsi," ujar Frans.



Frans mengungkapkan, perubahan sistem distribusi diatur dalam Perpres Nomor 6 Tahun 2025 dan Permentan No. 15 Tahun 2025 yang menegaskan Pupuk Indonesia kini bertanggung jawab penuh hingga titik serah. Dalam regulasi baru tersebut, titik serah tidak hanya terbatas pada kios pengecer, tetapi juga mencakup kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan koperasi. Skema baru ini dinilai lebih adaptif dan mempercepat proses distribusi pupuk ke petani.

Terdapat dua mekanisme utama penyaluran pupuk subsidi. Pertama, dari gudang produsen ke PUD, yang kemudian melakukan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan titik serah. Kedua, penyaluran langsung dari gudang produsen ke titik serah, yang memungkinkan proses distribusi berjalan lebih cepat dan efisien. "Skema baru ini membuka peluang penyaluran langsung ke titik serah dengan tetap melibatkan pelaku usaha distribusi di bawah naungan Pupuk Indonesia," tegasnya.

Monitoring Harian

Pupuk Indonesia juga melakukan monitoring stok harian hingga tingkat gudang penyangga kabupaten. Hasil pemantauan menunjukkan, stok pupuk bersubsidi di seluruh provinsi berada di atas batas aman. Urea subsidi sebanyak 502 ribu ton, dengan 258 ribu ton di gudang penyangga. NPK subsidi, 595 ribu ton, setara 272% dari *safety stock*. Petroganik dan ZA juga masing-masing mencapai lebih dari 200% stok aman. Untuk NPK Kakao ada 14 ribu ton sudah tersebar merata di seluruh Indonesia.

Data Pupuk Indonesia, sampai Agustus masih terdapat 6,89 juta dari 14,91 juta petani atau 46,2% yang terdaftar di e-RDKK belum menebus pupuk subsidi. Sementara pada tahun 2024 terdapat 2,98 juta dari 14,67 juta petani atau 20% petani yang terdaftar e-RDKK belum menebus pupuk subsidi.

Sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi hingga 28 September 2025 baru mencapai 62,2% dari alokasi kontrak dan 58,8% dari alokasi Keputusan Menteri Pertanian terhadap realokasi menjadi sebesar 9,55 juta ton. Sedangkan stok hingga 28 September 2025 untuk urea sebanyak 925 ribu ton, ZA 49 ribu , NPK 649 ribu ton dan Organik 56 ribu ton.

Artinya, masih terdapat sekitar 4 juta ton pupuk yang belum terserap dan siap disalurkan untuk mendukung puncak musim tanam mendatang. Karena itu, menurut Frans, perlu pemutakhiran data pada E-RDKK. Sesuai Permentan No. 15 Tahun 2025, pemerintah menetapkan e-RDKK dapat diperbaharui pada tahun berjalan.

Frans juga terus mengimbau PUD dan PPTS untuk segera mengisi gudang mereka. Pupuk tersedia sangat banyak, tinggal bagaimana mempercepat alirannya agar tidak ada keterlambatan di tingkat petani. "Jika alokasi pupuk di suatu daerah sudah terserap 80%, segera lakukan *realokasi* agar tidak terjadi kekosongan saat musim tanam. Pemerintah daerah, distributor, dan petani perlu berkoordinasi aktif," katanya.

Untuk mendukung keberlanjutan program subsidi, pendaftaran e-RDKK 2026 telah dibuka dan berlangsung hingga 25 Oktober 2025. Petani dengan lahan maksimal dua hektare dan tergabung dalam kelompok tani dapat mendaftar untuk mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun depan. "Data e-RDKK menjadi dasar penyaluran agar pupuk tepat sasaran. Kami berharap semua petani segera memperbarui data mereka," ujar Frans.

Mulai 1 Oktober 2025, pemerintah juga menaikkan margin fee untuk PPTS dari Rp75 menjadi sekitar Rp144 per kilogram. Kenaikan ini diharapkan dapat mengurangi praktik penjualan di atas HET dan memperbaiki kesejahteraan pelaku distribusi di lapangan. "Kami berkomitmen penuh mendukung petani. Dengan stok yang aman, jaringan distribusi kuat, dan tata kelola yang transparan, Pupuk Indonesia siap mengawal musim tanam tahun ini dengan baik," kata Frans. **Herman/Yul**

RI 1 Instruksikan **Revitalisasi Pabrik Pupuk**



Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan instruksi langsung untuk merevitalisasi pabrik pupuk milik negara. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya distribusi, serta menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya perbaikan sistem produksi dan distribusi pupuk nasional agar mampu menjawab kebutuhan petani dengan cepat dan tepat.

"Menteri Pertanian diminta mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman. Apabila memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki. Tujuannya agar jauh lebih efisien dan bisa menurunkan harga pupuk, harapannya meringankan para petani kita," ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai rapat, Kamis (16/10).

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti instruksi Presiden dengan langkah konkret di lapangan. Menurutnya, revitalisasi pabrik pupuk menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kemandirian produksi.

"Kami tentu siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Revitalisasi pabrik pupuk akan kami dorong agar produksi lebih efisien, pasokan lebih stabil, dan harga lebih terjangkau bagi petani. Ini sejalan dengan semangat besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan," katanya.

Sebagai langkah awal, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,2 juta ton untuk menghadapi musim tanam Oktober–Maret 2025/2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 259 persen dari ketentuan minimum stok yang dipersyaratkan pemerintah. Selain itu, terdapat pula 480 ribu ton pupuk non-subsidi yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan petani di luar alokasi subsidi.

Kementerian Pertanian optimistis bahwa langkah revitalisasi ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Dengan sistem produksi pupuk yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan, diharapkan biaya produksi pertanian dapat ditekan dan kesejahteraan petani semakin meningkat.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Usman Husin, mengatakan, penyediaan pupuk adalah kewajiban yang harus dilakukan pemerintah terutama untuk memenuhi unsur penting produksi agar selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada secara cepat dan singkat.

"Kami menyambut baik instruksi Presiden Prabowo yang meminta Mentan Amran memproduksi pupuk berkualitas tinggi tapi terjangkau oleh petani. Ini bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan," ujar Usman, Jumat, (17/10).

Usman menjelaskan, saat ini di pasaran telah beredar pupuk bersubsidi dan non-subsidi. Disisi lain pemerintah juga telah menetapkan harga pupuk bersubsidi sebesar Rp2.250/kg untuk urea, Rp2.300/kg untuk NPK, dan Rp800/kg untuk pupuk organik sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024.

"Dengan instruksi Presiden ini, saya yakin kualitas pupuk di Indonesia akan semakin baik. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan produksi pertanian, tapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani," katanya.

Modernisasi Pabrik Tua

Sementara itu PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani, salah satunya melalui strategi revitalisasi industri pupuk. Strategi ini dijalankan dengan memodernisasi pabrik tua hingga membangun pabrik baru agar proses produksi lebih efisien.

Efisiensi tersebut memungkinkan Pupuk Indonesia menekan biaya produksi, sehingga harga pupuk subsidi dan nonsubsidi bagi petani tetap terjangkau. Di sisi lain, kehadiran pabrik yang modern dan andal juga dapat memperkuat kontinuitas pasokan pupuk jangka panjang, sehingga kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi secara konsisten.

Untuk mewujudkan manfaat tersebut secara berkelanjutan, upaya revitalisasi ini juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. "Ke depan kami akan melakukan revitalisasi, karena pabrik-pabrik kami sudah tua. Kami juga sudah lama tidak melakukan pembangunan pabrik. Untuk merevitalisasi itu butuh Rp54 triliun," ujar Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi di Jakarta.

Rahmad mencontohkan, saat ini dari 15 pabrik Urea yang dimiliki Pupuk Indonesia, delapan diantaranya telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kondisi tersebut membuat rata-rata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton Urea mencapai 28 MMBTU, lebih tinggi dibandingkan standar global. Bahkan, khusus untuk delapan pabrik di atas 30 tahun, konsumsi gas rata-rata bisa mencapai 32,2 MMBTU per ton Urea.

"Untuk Urea saat ini rasio konsumsi energi kami tinggi sekali, rata-rata rasio konsumsi gas itu adalah 28 MMBTU per ton Urea," kata Rahmad. Karena itu, revitalisasi industri pupuk menjadi langkah kunci Pupuk Indonesia untuk menjawab tantangan kondisi pabrik yang sudah tua dan tidak efisien tersebut.

Melalui revitalisasi, kata Rahmad, konsumsi gas di Pupuk Indonesia Grup diproyeksikan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton Urea pada 2035. Efisiensi ini akan mampu menurunkan biaya produksi, sekaligus memungkinkan Pupuk Indonesia menyediakan pupuk dengan harga lebih terjangkau bagi petani.

Sebagai bagian dari langkah revitalisasi ini, Pupuk Indonesia telah memulai pembangunan Pabrik Pusri IIIB melalui PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Dengan target penyelesaian pada tahun 2027, Pusri IIIB akan menggantikan pabrik lama sekaligus menghadirkan infrastruktur modern yang mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton menjadi 21,7 MMBTU per ton Urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp 1,5 triliun per tahun.

"Kami sedang membangun satu pabrik bernama Pusri IIIB yang akan menggantikan pabrik yang sudah tua. Keberadaan pabrik ini akan menjadikan Pusri sebagai perusahaan pupuk tertua, tetapi dengan rata-rata umur pabrik yang paling muda dan paling efisien," kata Rahmad. **Yul**

Panen Perdana Varietas Chitra, AIMS Siap Dukung Pengembangan Kentang Industri di Merangin

Kelompok Tani Maju Bersama Makmur Sejahtera berhasil panen perdana kentang industri varietas Chitra produksi dari perusahaan pembibitan kentang PT Agra Intan Makmur Sejahtera (AIMS) pada Kamis (9/10). Berlokasi di Dusun Renah Mentelun, Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi berketinggian sekitar 1200 m dpl, dengan latar belakang pemandangan Gunung Masurai .

"Potensi lahan di Merangin ini ada dataran tinggi dan dataran rendah. Di sini bisa ditanami kentang, kopi, tanaman pangan, dan hortikultura dan saya lihat hasilnya cukup bagus. Mudah-mudahan kerja sama ini terus berlanjut dengan kelompok tani lainnya, lahan dapat bertambah luasnya, dan saling menguntungkan. Terutama untuk penyediaan benih. Di sini kami juga mempunyai balai benih. Padi dan jagung di sini juga berkembang dengan baik. Kalau mau bergerak di sektor pertanian, kita harus bekerjasama dengan swasta. Kami berharap bisa mensukseskan swasembada pangan sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, H. Mujibur Rahman, yang hadir di lokasi panen mewakili Bupati Merangin.

"Harapan saya kepada petani di Jangkat supaya maju bersama makmur sejahtera. Awalnya saya sedikit ragu untuk mengembangkan kentang di sini, namun setelah saya datang langsung dan belajar ke lahan pembibitan kentang AIMS di Garut, Jawa Barat, saya yakin berhasil. Selama penanaman varietas Chitra, yang terpenting adalah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), dan bibit varietas Chitra lebih tahan penyakit. Jumlah bibit yang ditanam 31.000 knol. Selain varietas Chitra kami juga menanam kentang sayur varietas Granola Kembang (GK) dan Granola Lembang (GL)," kata Vewa, petani muda dari Kelompok Tani.

Panen perdana secara simbolis dilaksanakan di lahan seluas 1,5 Ha. Hasil panen dari bibit G0 ini dijadikan bibit G2 yang selanjutnya akan ditanam kembali oleh para petani kentang di Kecamatan Jangkat. Luas pertanaman kentang 1,5 Ha, varietas Chitra ditanam mulai tanggal 13 Juni 2025. Setelah panen bersama, dilaksanakan diskusi bersama para petani.

"Panen perdana ini sudah cukup baik. Harapan saya untuk Dinas TPH membantu kegiatan pengecekan kondisi tanah. Ketika masa masih pertumbuhan dan perawatan, petani harus rajin menengok tanamannya. Kalau ada sedikit yang terlihat layu atau terindikasi kena penyakit dicabut saja, tidak perlu merasa rugi, sebab kalau dibiarkan penyakit akan menyebar. Kentang industri varietas Chitra sudah eksis di Sembalun, Lombok Timur, dengan hasil panen lebih dari 25 Ton/ha. Apabila berhasil dikembangkan di sini maka petani lebih mudah mencari bibit kentang industri, tidak perlu jauh-jauh membeli dari pulau Jawa dengan biaya pengiriman lebih besar. Bibit kentang dari AIMS unggul dan bersertifikat," kata Direktur Utama PT AIMS, Benediktus Tommy.

Petani di Kecamatan Jangkat sangat antusias ingin menanam varietas Chitra, sebab kentang industri lebih jelas pemasaran serta harga jualnya, yaitu ke perusahaan makanan ringan olahan kentang, seperti Indofood dan Calbee Wings Food. Selain itu, masyarakat yang berbisnis skala UMKM juga dapat mengolahnya menjadi keripik kentang, maupun kentang goreng (*french fries*). Adapun kentang Granola dapat diolah menjadi aneka pangan bergizi mendukung diversifikasi pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan Pemerintah Daerah

Kelompok Tani Renah Mentelun berkesempatan beraudiensi dengan Bupati Merangin, H.M Syukur setelah melaksanakan kegiatan panen perdana.

"Budidaya kentang tentunya kami dukung bersama dengan Dinas terkait. Yang terpenting adalah jaminan pasca panen, kentang petani ada yang menyerap/ membeli dengan harga yang meng-untungkan petani. Jangan sampai ada overproduksi dan tidak terserap sehingga petani merugi. Harus jelas bentuk dan perjanjian kerjasamanya, ketersediaan bibit dan sarana produksinya, serta berkelanjutan. Apabila ini berhasil dengan baik maka akan meningkatkan partisipasi aktif petani lainnya. Maksimalkan lahan-lahan kosong untuk pertanian demi mendukung swasembada pangan,"kata Bupati Merangin, H.M. Syukur.■











Susu, Komponen Utama MBG

Anak Sehat Peternak Sejahtera

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi menetapkan susu sebagai salah satu komponen utama dalam paket gizi untuk anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan janji kampanye Prabowo-Gibran, yakni menyediakan makan siang dan susu gratis bagi pelajar dan santri demi mencetak generasi yang sehat, kuat, dan cerdas.



Keputusan menjadikan susu sebagai bagian utama MBG bukan tanpa dasar. Tim Pakar Bidang Susu Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Guru Besar Ilmu dan Teknologi Susu Fakultas Peternakan IPB, Prof. Epi Taufik, menyebut bahwa susu adalah "paket nutrisi lengkap" yang terbukti secara ilmiah mampu mendukung pertumbuhan optimal anak-anak pada masa sekolah dasar dan menengah.

Susu memberikan 13 zat gizi esensial, termasuk kalsium, protein, dan vitamin D. Tidak ada satu jenis makanan lain yang dapat menggantikan kombinasi gizi seimbang yang terdapat dalam susu. "Susu bukan sekadar minuman pendamping makan siang, tetapi pondasi penting untuk membangun gizi anak Indonesia," ujarnya.

Prof. Epi menambahkan, masa pertumbuhan tercepat anak terjadi pada usia 9–12 tahun, ketika kebutuhan kalsium dan protein meningkat tajam. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata konsumsi kalsium anak Indonesia dari makanan sehari-hari baru memenuhi sekitar 7–12 persen dari kebutuhan harian. Karena itu, tambahan kalsium dan vitamin D dari susu menjadi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tulang, otot, dan perkembangan otak yang optimal.

Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas gizi, Prof. Epi menilai MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Dengan ketentuan kandungan minimal 20 persen susu segar lokal pada setiap produk susu MBG, pemerintah secara langsung menciptakan pasar tetap bagi peternak sapi perah di berbagai daerah.

"Kandungan minimal 20 persen susu segar adalah langkah awal. Jika produksi dalam negeri meningkat, komposisinya akan dinaikkan secara bertahap. Program ini bukan hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menyejahterakan peternak. Manfaatnya ganda, gizi naik, ekonomi rakyat bergerak," tuturnya.

Selama ini, industri susu nasional menghadapi tantangan besar yakni produksi susu segar dalam negeri (SSDN) belum mampu memenuhi permintaan nasional. Sebelum MBG diluncurkan, kebutuhan susu Indonesia sekitar 4,7 juta ton per tahun, sementara produksi lokal baru mencapai sekitar 1 juta ton. Dengan hadirnya MBG, kebutuhan susu nasional melonjak menjadi lebih dari 8 juta ton per tahun. "Kalau kita paksa seluruhnya menggunakan bahan baku lokal, stok susu nasional langsung habis. Karena itu, strategi bertahap menjadi pilihan paling realistis," tegas Prof. Epi.

Meski belum sepenuhnya menggunakan bahan baku lokal, kualitas susu MBG dijamin setara dengan susu segar penuh (full cream milk). Formulasi gizi produk MBG disusun berdasarkan standar Peraturan BPOM No. 13 Tahun 2023 tentang susu cair penuh, sehingga anak-anak tetap memperoleh manfaat gizi optimal untuk mendukung aktivitas belajar dan tumbuh kembang. "Anak-anak penerima program MBG tetap mendapatkan kandungan protein, kalsium, dan vitamin D yang setara dengan susu segar murni. Jadi, kualitas gizinya tidak dikorbankan," ujar Epi.

Kebangkitan Industri Susu

Selain manfaat gizi, MBG juga diharapkan menjadi pintu masuk kebangkitan industri susu nasional. Lonjakan permintaan susu akibat program ini diproyeksikan mendorong peningkatan signifikan pada produksi susu segar dalam negeri, sekaligus menciptakan rantai nilai ekonomi baru dari peternakan rakyat hingga industri pengolahan susu.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati (Hida), menegaskan bahwa MBG merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. "Janji kampanye Prabowo-Gibran kini telah diwujudkan melalui MBG. Setiap kotak susu yang diminum anak sekolah adalah simbol kerja nyata pemerintah membangun masa depan bangsa," ujar Hida.

Menurut Hida, BGN telah menyiapkan peta jalan peningkatan produksi susu nasional 2025–2029, termasuk program peningkatan populasi sapi perah, modernisasi peternakan, serta kerja sama antar daerah penghasil susu. Pemerintah bahkan berencana mengimpor 1 juta ekor sapi perah dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat untuk memperkuat populasi sapi nasional.

Menurutnya, MBG menciptakan efek domino positif. Dari peternakan, pakan, hingga industri pengolahan susu, semuanya ikut bergerak. "Kita realistis dengan kondisi saat ini, namun berkomitmen meningkatkan kandungan lokal setiap tahun agar peternak lokal menjadi pemain utama industri susu nasional," ujar Hida.

Ia menambahkan, sejak awal Presiden menekankan bahwa bahan baku MBG harus menyerap hasil peternak lokal. Dengan adanya pasar tetap dari pemerintah, ribuan peternak kecil kini memiliki kepastian penyerapan hasil produksi yang sebelumnya sulit mereka dapatkan. "Inilah bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat. MBG bukan hanya soal memberi makan, tetapi membangun sistem pangan nasional yang berdaulat," tegas Hida.

Lebih dari sekadar program gizi, MBG disebut sebagai investasi jangka panjang untuk membangun generasi masa depan. Pemerintah berharap, melalui program ini angka kekurangan gizi dan stunting dapat ditekan secara signifikan, sembari menciptakan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, kuat, dan cerdas. "Kita ingin MBG menjadi warisan jangka panjang. Tidak hanya menurunkan angka kekurangan gizi, tapi juga menciptakan generasi yang siap bersaing menuju Indonesia Emas 2045," tutur Hida.

Program Makan Bergizi Gratis kini bukan sekadar memberi makan anak-anak sekolah. Di balik segelas susu yang disajikan setiap hari, tersimpan harapan besar, untuk membangun masa depan bangsa yang sehat, berdaya saing, dan berdaulat pangan. "Dari segelas susu, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia," kata Prof. Epi Taufik.

Humas BGN



Tinggalkan Dunia Perbankan,

Dwi Bangun Bisnis Durian Endule

Tak selamanya orang akan nyaman bekerja di dunia perbankan. Seperti Dwi Meirawati (35) yang lebih memilih usaha sendiri dan kini menjadi pemilik usaha Durian Endule di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Bertemu dengan Tabloid Sinar Tani saat pre event ke-5 Nusantara Melon Fest di Gedung Kementerian Pertanian, beberapa waktu lalu, Dwi menceritakan kisahnya merintis usaha setelah keluar bekerja dari salah satu bank BUMN. Bersama suaminya, ia membangun UMKM dan menjual berbagai produk makanan, kue ulang tahun, kue basah dan kue kering.

Bukan tanpa alasan, Dwi memilih keluar bekerja setelah menikah. Dwi dan suaminya ingin memiliki bisnis sendiri yang menurutnya lebih berkah. “Saya lulus jadi sarjana tahun 2015 kemudian saya kerja di bank dan suami saya ingin usaha sendiri. Saya cari yang lebih berkah. Jadi saya dan suami keluar kerja saat saya hamil anak pertama 7 bulan,” katanya.

Dwi bersama sang suami kemudian memulai menjalankan usaha makanan ringan. “Saya hijrah dan mulai dari usaha cake ulang tahun, cake brownies, kue basah dan kue kering,” ujarnya.

Namun usaha yang dirintis tersebut tak semudah yang dibayangkan. Keuangan pasangan muda yang tengah mencoba mandiri membangun usaha ini sempat kritis. Kondisi keuangan tak dipungkiri mengalami kendala utama, terutama setelah memutuskan keluar dari bank.

Apalagi ternyata dalam pemasaran juga tak mudah. “Kendala yang ditemui pemasarannya masih susah,” ujarnya. Jatuh bangun dalam membangun usaha tak membuat Dwi putus asa. Bersama suaminya ia terus berdiri tegak.

Dalam membuat kue kering, Dwi melakukan sendiri. Ternyata antusiasnya masyarakat terhadap produk yang dijual lumayan banyak. Dwi kemudian mulai fokus mengembangkan dengan menjual artisan, kue-kue kering.

“Kita juga jual di marketplace dan agen reseller untuk kue kering. “Lama kelamaan pesanan mulai berdatangan dan mulai berkembang,” kata Dwi yang tinggal di Jl. Senang Lingkar Buana Rt 15/03 Kel. Cijoho Kec. Kuningan, Kab Kuningan.

Tak puas hanya bisnis cake, Dwi mencoba menambah lini bisnis di dunia minuman. Saat itu, rintisannya masih sederhana dan dikerjakan berdua di rumah, dengan alat berupa mixer dan lain-lain. “Saya buat durian kocok endule. Ada tiga varian robusta, original dan dancow,” ujarnya.

Selain itu, Dwi juga mencoba membuat keripik durian. Selama ini belum ada yang mengusahakan. Durian diolah sendiri, dari daging durian kemudian ditumbuk, lalu diolah menjadi chips. “Kripik ini cocok buat teman minum susu dan sereal,” ujarnya.

Dwi bercerita, usaha durian kocok usaha dimulai tahun 2018. Sedangkan durian chips sebenarnya produk dadakan. Waktu itu ada acara besar Festival Durian di Cibuntu, Kuningan, dirinya diminta Dinas Pertanian untuk membuat keripik durian.

“Saat itu saya belum punya produk kiripik durian. Lalu saya coba inisiatif, bagaimana caranya membuat brownies dari durian. Jadi lahirlah durian chips. Bahan bakunya dari daging durian yang melimpah. Saya kirim dari Palembang, daging durian beku, sehingga siap sepanjang waktu,” tuturnya.

Dwi mengakui, ketika baru mencoba membuat kue berbahan baku durian ada *trial end error,* bahkan dirinya berkali-kali gagal. “Saya berhasil ketika daging duriannya saya masak dulu. Saya buat sampai jadi dodol setelah kering dikristal, baru di blender. Jadilah bubuk durian,” tuturnya.

Dwi menegaskan, agar konsumen tidak kecewa, ia berusaha menjaga kualitas. Saat ini wilayah jangkauan pasar yakni Kabupaten Kuningan dan Cirebon. Cerita Dwi menjadi inspirasi bahwa ketika berusaha akan menghadapi pasang surut. Pastinya, setelah melewati masa-masa sulit, akan ada kemudahan. Kerja keras Dwi kini berbuah manis. **Echa/Yul**



Titin Angkat Martabat Pepaya

Banyak UMKM di Indonesia yang memproduksi manisan pepaya sebagai produk unggulan. Produk ini pun dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional, toko oleh-oleh, atau bahkan melalui platform e-commerce.

Salah satu produk olahan adalah manisan. Manisan pepaya dibuat untuk mengubah pepaya mentah menjadi produk olahan yang lebih bernilai. Dengan penambahan gula, dan asam Jawa, manisan pepaya dapat bertahan lebih lama.

Adalah Titin Sartini (52 tahun), salah satu pelaku UMKM yang beralamat di Desa Cibentang, Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat yang membuat manisan pepaya asam Jawa. Selain manisan, ia juga membuat dodol pepaya nanas, kalua pepaya dan basreng. “Produk ungggulan saya yang paling banyak dicari adalah manisan pepaya asam Jawa atau yang biasa saya sebut manisan Candy,” ujarnya.

Titin bercerita, inspirasi membuat produk makanan berbahan baku pepaya berawal pada tahun 2014. “Saya dulu awalnya bingung mau usaha apa. Tahun itu saya belum usaha produk olahan pepaya, tapi masih gonta-ganti. Kemudian saya menemukan pepaya yang banyak tumbuh di sekitar rumah tetangga,” tuturnya.

Titik kemudian berpikir bagaimana caranya agar dapat menghasilkan uang dari buah pepaya yang banyak terbuang. Ia kemudian berinisiatif membuat manisan warna dan mempunyai rasa agak asam. “Di tempat tinggal saya, pepaya melimpah. Saya coba bantu petani. Pepaya yang tadinya terbuang dan tumbuh liar begitu saja, saya minta ke petani untuk dikumpulkan dan bawa ke eumah saya,” tuturnya.

Ketika Titin membuat manisan pepaya asam jawa malah banyak sekali peminatnya, bahkan banyak laku di pasaran. Apalagi saat itu belum ada saingannya. Ketika usaha manisan pepaya asam Jawa mulai stabil penjualannya, ia mencoba membuat dodol pepaya dari buah yang agak tua. Sedangkan produk olahan kalua, ia mengolah dari pepaya mengkel.

“Alhamdulillaah sampai sekarang berjalan lancar. Kerjasama saya dengan beberapa petani tetap terjalin baik,” ujarnya. Setiap produksi, Titin bisa menghabiskan 2 kwintal pepaya. Sedangkan produk olahannya di jual hampir semua toko oleh-oleh di Kuningan, bahkan kini telah masuk pasar Cirebon dan Bandung. Kini Titin mampu meraih omzet hingga Rp 10 juta per bulan.

Titin berharap kedepan Pemerintah Daerah bisa membantu pelaku UMKM dalam permodalan dan mempromosikan. **Echa/Yul**

PPVTPP
Raih Penghargaan Pelayanan Prima



Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTPP) Kementerian Pertanian meraih Piagam Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi dengan kategori Pelayanan Prima. Penghargaan ini dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri lingkup Kementan tahun 2025.

Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA), Nurwahida menyampaikan bahwa capaian ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras dan konsistensi PVTPP dalam meningkatkan mutu pelayanan publik, baik melalui inovasi maupun penerapan layanan digital.

"Kita bangga atas capaian pelayanan prima hari ini, namun saya juga mengingatkan agar kita tidak berpuas diri. Jangan sampai penghargaan ini membuat kita lengah dan menurunkan kualitas layanan," ujar Nurwahida, Senin (13/10).

Nurwahida menambahkan, pelayanan publik harus terus diperkuat melalui kekompakan dan komitmen seluruh tim. "Dalam pelayanan publik, komitmen kita harus sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan semangat dan tanggung jawab yang tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Pusat PVTPP, Leli Nuryati menyampaikan, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran PVTPP untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan perizinan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan digitalisasi.

"Layanan PVTPP memiliki tanggung jawab besar dalam menjangkau pelaku usaha agar memperoleh perizinan dengan cepat dan mudah. Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi bukti bahwa upaya kami di bidang digitalisasi layanan berjalan dengan baik," ujar Leli.

Leli menambahkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan PVTPP yang mencapai skor 3,7, melampaui target yang ditetapkan, menjadi indikator keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor perizinan pertanian.

"Penghargaan ini sangat berarti bagi kami yang bertugas di bidang pelayanan publik. Selain pengakuan dari Kementan, kami juga mendapat apresiasi dari masyarakat melalui hasil IKM yang tinggi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Leli menegaskan bahwa capaian tersebut sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian Pertanian. PVTPP berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kontribusi dalam mendukung kemudahan berusaha di sektor pertanian.

"Kualitas layanan perizinan PVTPP sudah sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Ke depan, kami akan terus berupaya memperkuat peran PVTPP agar manfaat layanan publik dapat dirasakan oleh seluruh pelaku usaha pertanian," katanya.

Humas PVTPP

SDM

Enam UPT BPPSDMP Raih KIPP 2025, **Pelayanan Publik Semakin Prima**



Enam UPT BPPSDMP meraih juara KIPP 2025 dan membawa layanan publik pertanian ke level baru. Pelatihan, konsultasi, dan teknologi kini lebih mudah diakses petani. Pencapaian ini menegaskan komitmen dalam menghadirkan layanan yang cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat pertanian.

Kementerian Pertanian memberikan apresiasi tinggi bagi unit-unit pelayanan publik terbaik di lingkungannya. Tahun ini, enam unit di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) berhasil meraih penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2025.

Unit yang berhasil meraih penghargaan tahun ini adalah Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batu, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian (BB Pustaka), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta–Magelang, dan Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI).

Piagam penghargaan diserahkan langsung Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur (OSDMA) Kementan, Nurwahida, di Kantor Pusat Kementan, Senin (13/10). Nurwahida menegaskan, penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata dari upaya memperkuat budaya pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada masyarakat.

Menurutnya, setiap unit kerja yang berinovasi dan menjaga mutu layanan publik layak diapresiasi, karena hal ini menjadi dorongan agar semangat perbaikan terus hidup di seluruh lini. "Pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Semakin prima pelayanannya, semakin tinggi pula kepercayaan publik terhadap Kementan," ujarnya.

Penghargaan KIPP 2025 merupakan hasil kolaborasi Kementan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri yang dilakukan Biro OSDMA Kementan.

Dari proses penilaian yang panjang, terpilih 17 unit kerja finalis inovasi, terdiri dari 15 inovasi umum dan dua inovasi replikasi. Keenam UPT BPPSDMP yang meraih penghargaan menunjukkan inovasi pelayanan publik di sektor pertanian semakin relevan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan komitmen pelayanan publik di lingkungan BPPSDMP terus berkembang. Plt Sekretaris BPPSDMP, Nurul Qomariah menilai penghargaan ini menjadi inspirasi bagi seluruh UPT untuk terus meningkatkan pelayanan agar semakin prima.

Kepala BPPSDMP, Idha Widi Arsanti, menekankan pelayanan publik di sektor pertanian bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang bagaimana lembaga hadir untuk membantu petani, penyuluh, dan pelaku usaha tani berkembang. Ketika pelayanan publik responsif, masyarakat akan lebih mudah mengakses pengetahuan, pelatihan, hingga teknologi pertanian terbaru.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, selama ini kerap menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa inovasi yang lahir di satu unit harus menular ke seluruh lini agar manfaatnya dirasakan secara luas.

Kegiatan penghargaan menjadi upaya berkelanjutan Kementan mendorong penerapan pelayanan publik yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Praktik baik dari unit-unit berprestasi diharapkan dapat direplikasi ke instansi lain, sehingga pelayanan publik pertanian semakin mudah, cepat, dan berdampak bagi masyarakat.

Penghargaan ini bukan garis akhir, melainkan awal dari komitmen panjang menuju pelayanan publik yang semakin tangguh, adaptif terhadap perubahan zaman, dan benar-benar memberi manfaat bagi pertanian Indonesia.**Humas BPPSDMP**

Mewaspadai Serangan Penyakit Blas, **Menjaga Senyum Petani Indonesia**

Oleh : **Ir. Sri Hartati, M.P.**
Penyuluh Pertanian Ahli Utama BRMP Kementerian Pertanian

Asuransi keberhasilan sebuah usahatani adalah terbebasnya tanaman dari serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), oleh karena itu kemampuan petani agar mampu menjaga tanamannya sangat diperlukan sebab, apa arti jerih payah selama berbulan-bulan jika akhirnya hasil panen belum sesuai harapan hanya karena serangan hama, penyakit, atau gulma? Di sinilah pentingnya kewaspadaan dan kolaborasi semua pihak, antara petani, petugas lapangan, hingga pemerintah dalam menjaga ketahanan pertanian kita.

Peran petugas lapangan seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), dan Pengawas Benih Tanaman (PBT) menjadi sangat vital. Mereka bukan sekadar pendamping teknis, tetapi juga garda depan yang memastikan petani mendapat informasi dan pendampingan tepat waktu. Harapan mereka sederhana: melihat petani tersenyum bahagia karena tanamannya tumbuh sehat dan panennya berhasil.

Namun, tantangan di lapangan tidaklah sederhana. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu memberi dampak besar pada dinamika OPT, termasuk penyakit yang kini makin sering muncul di waktu dan tempat yang tak terduga. Salah satu penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus ini adalah penyakit blas, musuh lama petani padi terutama di lahan kering yang berpeluang untuk menyerang.

Dulu, penyakit blas lebih banyak menyerang padi di lahan kering. Kini, penyakit ini juga sudah hadir di lahan basah/sawah sehingga perlu mendapat perhatian serius. Interaksi antara patogen yang virulen (ganas), lingkungan yang mendukung, dan tanaman yang rentan (mudah terserang penyakit) berpeluang besar untuk menurunkan produksi padi terutama di lahan kering, bahkan berpotensi untuk menyebabkan gagal panen. Apalagi, bagi petani yang belum berpengalaman, mengendalikan penyakit ini bukan perkara mudah.

Penyakit blas disebabkan jamur *Pyricularia oryzae*, yang berkembang biak lewat spora mikroskopis dan ringan. Spora ini bisa menempuh jarak hingga puluhan kilometer melalui angin, atau menempel di alat pertanian dan pakaian. Akibatnya, penyebaran penyakit ini sangat cepat. Gejala awal biasanya muncul di daun berupa bercak berbentuk belah ketupat berwarna merah (leaf blast) yang kemudian berwarna abu-abu/memutih di tengah dengan tepi merah kecokelatan. Jika tidak segera dikendalikan, serangan dapat menjalar ke bonggol batang (node blast) dan leher malai (neck blast), menyebabkan bulir padi hampa dan panen gagal total.

Lalu, apa yang bisa dilakukan petani untuk melindungi tanamannya?

Langkah pencegahan menjadi kunci. Gunakan benih sehat dari varietas tahan blas. Terapkan teknik budidaya padi yang baik dan benar (Indo GAP), hindari penggunaan pupuk nitrogen secara berlebihan, dan kendalikan gulma berdaun sempit yang bisa menjadi inang penyakit. Petani diharapkan melakukan pengamatan rutin, terutama saat mulai muncul gejala pada daun. Bila serangan masih ringan, lakukan pengendalian dan jika hanya sedikit segera cabut dan musnahkan tanaman yang terinfeksi. Jangan lupa, jaga kebersihan lingkungan serta peralatan pertanian agar jamur tidak berpindah ke tanaman lain serta komunikasikan ke petugas lapangan.

Selain itu, penerapan *Early Warning System* (EWS) sangat penting. Sistem peringatan dini ini memungkinkan petani, petugas lapangan, dan instansi terkait saling berbagi informasi untuk mengambil langkah pengendalian secepat mungkin. Dengan EWS, kita tidak hanya bereaksi ketika penyakit sudah menyerang, tetapi juga mampu mengantisipasi sebelum kerugian terjadi.

Pada akhirnya, pengendalian penyakit blas bukan hanya soal teknis pertanian, tetapi juga soal kolaborasi dan kepedulian bersama. Ketika Petani, Penyuluh, POPT, PBT dan Pemerintah (Instansi terkait, TNI, Polri, dll) bekerja dalam satu semangat yang sama, semangat menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, maka cita-cita menuju swasembada pangan mudah tercapai. Karena sejatinya, setiap butir padi yang tumbuh sehat di sawah adalah hasil dari kerja keras, ilmu, dan rasa cinta terhadap bumi Indonesia.

Kolom

Kaki Lima: Potensi Ekonomi berbasis Skala Mikro



Oleh: **Memed Gunawan**

Potensi Ekonomi Kuliner Kaki Lima Indonesia luar biasa karena didukung kekayaan ragam pangan, konsumsi masyarakat dan perkembangan pariwisata. Di tengah usaha masyarakat kecil yang belum tertata baik ini konsumennya cukup fanatik (konon makanan enak ada di Kaki Lima bukan di Hotel Bintang Lima), lalu bagaimana caranya mengangkat kegiatan ekonomi kuliner Kaki Lima agar jadi andalan?

Raja Kaki Lima di Singapura dan Thailand menata pedagang dengan konsep "*street food zoning*", mereka metetapkan lokasi tertentu, menyediakan infrastruktur dasar (air, listrik, kebersihan), pedagang mendapat izin resmi dan dikenai retribusi kecil. Street food dianggap aset pariwisata nasional, dan ini diakui UNESCO yang terus dipromosikan oleh pemerintah.

Masalah utama Kaki Lima di Indonesia masih terkait dengan Tata Ruang dan Perizinan lemah, banyak warung kaki lima beroperasi di trotoar atau bahu jalan tanpa izin resmi. Demikian juga tidak ada zonasi khusus untuk pedagang kaki lima (PKL) di banyak kota sehingga muncul "pengaman" tidak resmi.

Ketertiban dan kebersihan kurang terjaga, pengelolaan sampah, air bersih, dan limbah makanan belum terstandar. Hal ini membuat citra "kumuh" dan sering jadi alasan penertiban oleh Satpol PP. Hubungan dengan pemerintah bersifat represif, bukan pembinaan, sering digusur tanpa solusi alternatif. Belum banyak kota yang punya model "Penataan PKL Terpadu". Akses modal dan pelatihan terbatas, sebagian besar PKL tidak punya akses ke kredit mikro formal, dan Pelatihan Sanitasi, Manajemen, dan Digitalisasi masih minim.

Di Thailand Singapura kondisi sangat tertata, Pemerintah membangun *Hawker Centres:* area bersih, higienis, dan murah, pedagang harus memiliki lisensi dan lulus pelatihan kebersihan makanan. Harga tetap terjangkau karena dikontrol dan disubsidi sebagian. Hawker diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak benda Dunia.

Indonesia mempunyai banyak bahan baku dan produk makanan andalan yang bisa dikembangkan jadi kegiatan ekonomi melalui Usaha Kaki Lima, termasuk Pasar Petani dan Produk Kerajinan apalagi dengan perkembangan dunia kuliner dan pariwisata yang masif di berbagai wilayah.

Untuk menaikkan citra, Kaki Lima memerlukan pengakuan & legalisasi. PKL menjadi bagian dari ekonomi urban formal. Mereka perlu diberi izin sederhana & terjangkau dan juga dilindungi, berbasis zonasi dan pemberian fasilitas dengan akses air, listrik, pembuangan sampah dan layanan kebersiihan.

Kaki Lima memerlukan Pendekatan Kolaboratif, bukan represif: yaitu utamakan pembinaan, insentif dan kemitraan pemerintah–komunitas–NGO, Pengembangan kapasitas dan akses modal berupa pelatihan sanitasi, manajemen usaha, pemasaran digital, serta akses kredit mikro/subsidi modal kerja, dan juga Branding Budaya & Pariwisata, mengangkat kuliner jalanan sebagai Aset Lokal untuk wisata kuliner.

Perlu juga dicatat bahwa Usaha Kaki Lima itu paling tahan banting, jarang mengalami kebangkrutan dan tutup usaha, kecuali karena tekanan keamanan yang dilakukan oleh beberapa oknum, serta penggusuran akibat tidak adanya zonasi yang direncanakan dengan baik.

Peringatan HPS ke-80

Konversi Lahan Pertanian, Ancaman di Depan Mata



Tanggal 16 Oktober menjadi salah satu hari bersejarah bagi masyarakat dunia, khususnya di bidang pangan. Setiap tanggal tersebut, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) dan menjadi momentum menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ketersediaan pangan bagi semua orang.

Peringatan Hari Pangan Sedunia, lahir dari semangat global untuk mengakhiri kelaparan, mengatasi masalah gizi, serta mendorong sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Hari Pangan Sedunia atau *World Food Day* diperingati sebagai penghormatan lahirnya organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/*FAO) pada 16 Oktober 1945.

Penetapan tanggal tersebut diumumkan secara resmi dalam Konferensi FAO ke-20 pada tahun 1979. Sejak saat itu berbagai negara di dunia memperingati sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan global.

Hari Pangan Sedunia kini menjadi simbol solidaritas internasional dalam memastikan bahwa setiap individu di dunia berhak memperoleh akses terhadap makanan yang cukup, bergizi, dan aman. Pada tahun 2025, lembaga di bawah naungan PBB ini genap berusia 80 tahun.

Peringatan HPS tahun ini, Indonesia masuk dalam daftar penerima rekognisi FAO atas kontribusi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dunia. Penghargaan diserahkan pada acara *Global Technical Recognition Ceremony* di Kantor Pusat FAO, Roma, Italia, Rabu (15/10).

Indonesia menjadi salah satu dari 18 penerima rekognisi KSST pada dua kategori *Country-Level Recognition dan Institutional-Level Recognition.* Dari 18 penerima, hanya lima perwakilan negara (Arab Saudi, Brasil, Tiongkok, Uganda, dan Maroko) yang dipanggil kepodium untuk menerima penghargaan langsung. Indonesia bersama penerima lainnya disampaikan melalui penayangan di layar utama dan penyampaian sertifikat digital oleh FAO.

Pada kategori Country-Level, FAO mengapresiasi peran Indonesia dalam mendorong transformasi pertanian dan ketahanan pangan global melalui program KSST yang selaras dengan FAO Strategic Framework 2022–2031 dan visi *"Four Betters" (better production, better nutrition, better environment, better life).*

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Ali Jamil, mengungkapkan penghargaan ini adalah sebuah simbol dari dunia Intenasional bahwa Indonesia telah bertransformasi menjadi solusi bagi pertanian di dunia. Penghargaan ini merupakan pengakuan dunia atas peran strategis Indonesia sebagai penyedia solusi pertanian bagi negara berkembang.

"Indonesia telah bertransformasi dari penerima menjadi penyedia teknologi, tenaga ahli, dan inovasi pertanian global, seraya berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dunia," ungkap Ali Jamil.

Lahan Masa Depan Pangan

Di tengah kebanggaan penghargaan dari FAO tersebut, di sisi lain Peringatan HPS juga menjadi pengingat bahwa ketersediaan pangan tak lepas dari ketersediaan lahan. Lahan pertanian adalah masa depan pangan Indonesia. Guru Besar IPB University, Prof Suryo Wiyono dan Prof Baba Barus, menyoroti alih fungsi lahan sawah yang kian mengkhawatirkan.

"Luas lahan sawah kita hanya sekitar 7,3 juta ha. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan negara lain. Secara global, Indonesia berada di peringkat 130 dari 180 negara untuk ketersediaan lahan pertanian per kapita," kata Prof Suryo.

Data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), luas sawah menurun dari 8,1 juta ha (2015), namun pada tahun 2019 tinggal 7,4 juta ha. Konversi lahan terus terjadi 60.000–80.000 ha/tahun, bahkan sempat mencapai 96.512 ha/tahun selama periode 2000–2015.

"Kalau konversi mencapai 100 ribu ha/tahun, maka dalam 10 tahun kita kehilangan satu juta hektare. Itu luar biasa dampaknya bagi pangan nasional," tegas Prof Suryo yang juga Dekan Fakultas Pertanian IPB University. Mirisnya menurut Prof Suryo, konversi banyak terjadi di lahan subur seperti Jawa, Sumatera, dan Bali karena tekanan ekonomi. "Satu meter persegi tanah bisa bernilai miliaran rupiah untuk perumahan atau industri, sementara hasil panen padi tidak sebanding," tambahnya.

Sebagai solusi, Prof Suryo menekankan tiga strategi melindungi lahan subur, membuka area baru pertanian, serta meningkatkan produktivitas. Ia juga mendorong diversifikasi melalui tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti jamur pangan *(edible)*, hortikultura, dan rempah.

Senada, Prof Baba Barus, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University mengingatkan, bahwa perlindungan formal terhadap sawah masih sangat lemah. Saat ini sekitar 3 juta ha sawah di Indonesia belum masuk kategori lahan yang dilindungi secara formal. "Kalau perlindungan tidak kuat, konversi sawah bisa terjadi dengan cepat," ujarnya.

Meski Undang-Undang 41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah ada, tapi implementasinya di daerah masih lemah. Banyak peraturan daerah (perda) dibuat tanpa peta spasial yang jelas, sehingga perlindungan lahan tidak berjalan efektif. Akibatnya, 23 provinsi kini mengalami defisit sawah, sementara hanya 14 provinsi yang surplus.

Prof. Baba juga menyoroti bahwa persoalan pangan tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga distribusi dan akses. "Kalau bicara angka global, Indonesia seakan tidak kekurangan beras. Namun isu distribusi dan daya beli masyarakat tetap menjadi tantangan," katanya seperti dikutip dari laman *IPB University.*

Karena itu, Prof Baba menambahkan pentingnya konsistensi kebijakan perlindungan sawah dan transisi yang adil bagi petani. Ia juga menekankan perlunya memperhatikan faktor air, produktivitas, hingga ketergantungan petani terhadap lahan.

Momentum HPS menjadi pengingat bahwa alih fungsi lahan bukan sekadar isu teknis, tetapi persoalan strategis bangsa. Tanpa komitmen serius dari pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, ancaman krisis pangan akan semakin nyata. **Yul**

Tawon atau Lebah, Siapa Paling Ganas?

Masyarakat kadang tidak begitu tahu membedakan antara tawon dan lebah. Meski ciri-cirinya hampir mirip, ternyata kedua serangga tersebut berbeda. Pakar Serangga IPB University, Prof Tri Atmowidi memberikan penjelasannya.



Kasus meninggalnya seorang nenek akibat disengat kawanan serangga yang diduga *tawon gung* sempat menimbulkan geger warga Padukuhan Wirosutan, Srigading, Sanden, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kejadian yang berlangsung Selasa (7/10) petang tersebut menimpa Walbiyah (65).

Prof. Tri meluruskan informasi tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat terkait penanganan yang tepat saat terjadi sengatan. Istilah *tawon gung* yang beredar di masyarakat umumnya mengacu pada spesies *Vespa affinis* atau *Vespa velutina*. Kedua jenis ini termasuk dalam kelompok *Spheciformes* dan dikenal memiliki tubuh ramping, berwarna coklat kehitaman dengan belang mencolok pada bagian perut.

"Secara umum, tawon memiliki rambut tubuh yang lebih sedikit dibandingkan lebah dan bersifat lebih agresif," katanya seperti dikutip dari *laman IPB University.* Berdasarkan foto yang beredar di media, Prof Tri menduga serangan serangga yang menimpa seorang nenek di Bantul bukan disebabkan tawon, melainkan lebah hutan besar (*Apis dorsata*).

"Dari ciri sarangnya, tampaknya itu bukan sarang tawon, melainkan sarang lebah besar yang hanya terdiri dari satu sisiran besar dan biasa menggantung di batang pohon tinggi," ujarnya. Berdasarkan ciri-cirinya, lebah hutan memiliki ukuran tubuh sekitar 17–20 milimeter, berwarna coklat dengan belang kuning kecoklatan pada bagian abdomen. Jenis ini dikenal sangat defensif dan tidak dapat dibudidayakan karena perilakunya yang sering bermigrasi.

"Dalam kasus di Bantul, kemungkinan korban disengat puluhan lebah *Apis dorsata*. Meskipun satu lebah hanya dapat menyengat sekali, jika jumlahnya puluhan, racun yang masuk ke tubuh bisa menimbulkan efek toksik serius hingga menyebabkan kematian," tuturnya.

Tawon umumnya lebih berbahaya dibanding lebah karena dapat menyengat berkali-kali tanpa kehilangan sengatnya. Sebaliknya, lebah hanya mampu menyengat satu kali karena sengatnya akan tertinggal di kulit korban. "Venom lebah jumlahnya memang lebih banyak, namun racun tawon (terutama *Vespa*) memiliki daya toksik yang lebih kuat dan serius pada manusia, bahkan bisa menyebabkan kematian," tambahnya.

Dalam keadaan terganggu, menurutnya, tawon dan lebah akan menyengat sebagai bentuk pertahanan diri. Namun sengatan tawon lebih berbahaya, karena tawon mampu menyengat berkali-kali. Bahkan sengatnya tidak lepas dari tubuhnya setelah menyengat.

Berbeda dengan lebah yang sengatnya akan lepas setelah menyengat target. "Setelah menyengat, sengat lebah akan menempel pada bagian yang disengat dan lepas dari tubuh lebah. Dengan demikian, satu individu lebah hanya bisa menyengat satu kali," tambahnya.

Namun ungkap Prof. Tri, baik tawon maupun lebah dapat memicu reaksi alergi berat dan bahkan kematian, terutama pada individu yang sensitif atau menerima banyak sengatan sekaligus. Racun lebah, yang dikenal sebagai *apitoksin,* mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti protein, peptida, dan amina biogenik (*histamin, dopamin, melittin,* serta *fosfolipase).*

Ia mengungkapkan, pada reaksi lokal, gejala yang muncul berupa nyeri, panas, bengkak, dan gatal di area sengatan. Sementara pada reaksi sistemik atau anafilaksis, gejalanya bisa lebih berat, mulai dari kulit kemerahan, pembengkakan pada bibir dan kelopak mata, hingga sesak napas dan pingsan.

"Jika korban menerima banyak sengatan sekaligus, racun dapat menyebabkan kerusakan organ vital seperti hati dan ginjal. Kondisi ini membutuhkan penanganan medis darurat," ungkapnya.

Perbedaan Fisik

Prof Tri menjelaskan cara mudah membedakan kedua serangga ini secara visual. Secara taksonomi, lebah (*bees*) termasuk dalam kelompok Apiformes, sedangkan tawon *(wasps)* termasuk dalam Spheciformes. "Secara morfologi, keduanya mudah dibedakan. Lebah mempunyai tubuh yang sangat berambut, termasuk tungkainya, sedangkan tawon cenderung lebih sedikit rambut," tuturnya.

Dari segi warna, lebah bervariasi seperti coklat, hitam, dan beberapa dengan belang di bagian perut (abdomen). Tawon umumnya berwarna coklat dengan variasi belang pada abdomennya.

Lebah memiliki ratusan spesies. Contoh yang umum adalah lebah madu (*Apis cerana dan Apis mellifera*) serta lebah tanpa sengat (*stingless bees*, klanceng, teuweul) yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Sementara contoh tawon adalah tawon vespa (*Vespa velutina, Vespa affinis*).

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada perilaku makan. Lebah termasuk herbivora (pemakan tumbuhan) terutama nektar dan serbuk sari (polen). "Hal ini sesuai dengan tipe alat mulutnya yang dapat mengisap cairan dan mengunyah dengan menggunakan mandibulanya," jelas Prof Tri.

Lebah sangat aktif mencari sumber pakan untuk keperluan tubuhnya sendiri dan memenuhi pakan bagi larva di dalam sarang. Mereka menyimpan polen dan madu (nektar yang telah diolah dalam lambungnya) dalam sarang sebagai cadangan makanan.

Sebaliknya, tawon termasuk hewan predator (pemangsa) yang memakan serangga dan hewan kecil lainnya. "Aktivitas perburuan mangsa oleh tawon juga cukup aktif, karena tawon juga termasuk serangga sosial yang memberi makan larvanya di dalam sarang," paparnya.

Baik lebah maupun tawon memiliki habitat yang cenderung sama, yaitu pada area yang terdapat sumber pakan dan bahan untuk membuat sarang. Tawon dan lebah madu *Apis cerana* dapat ditemukan di perkampungan dan kebun dengan pohon yang bervariasi sebagai sumber pakan. Kedua serangga ini berkembang biak dalam sarang dan termasuk serangga sosial yang mengembangkan sistem kasta (ratu, jantan, pekerja). **Yul**

Disengat Tawon atau Lebah, Ini Cara Mengatasinya

Bagaimana kalau kita disengat tawon atau lebah? Pakar Serangga IPB University, Prof Tri Atmowidi menyarankan, langkah pertama yang harus dilakukan saat disengat tawon atau lebah adalah menjauh dari lokasi sarang agar tidak diserang kembali.

Jika yang menyengat adalah lebah, segera keluarkan sengat yang tertinggal di kulit, cuci area tersebut dengan air sabun, dan kompres menggunakan air dingin. "Minumlah obat antihistamin untuk mengurangi reaksi alergi. Bila korban mengalami sesak atau pingsan, segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut," imbaunya.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau tidak panik dan jangan mengusir tawon dan lebah secara mandiri. Jika menemukan sarang di sekitar permukiman, segera laporkan kepada dinas terkait seperti pemadam kebakaran atau ahli lebah/tawon.

"Jangan melakukan gerakan mendadak atau berisik di sekitar sarang karena bisa memicu serangan kawanan lebah atau tawon. Cukup beri tanda peringatan di lokasi dan menjauh dengan tenang," kata pakar dari Departemen Biologi IPB University. **Yul**

Isi Dapur MBG, Sayur Arif Simbol Harapan Anak-anak



Sayur segar dari kebun hidroponik Arif Hermawan kini rutin masuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lumajang. Tiap akhir pekan, ia tak hanya panen sayur, tapi juga panen cuan dari hasil jerih payahnya.

Di halaman rumah sederhana di Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, deretan sayuran hijau tumbuh rapi di pipa-pipa paralon putih. Itulah kebun hidroponik milik Arif Hermawan, petani milenial yang kini jadi salah satu pemasok utama dapur MBG.

Setiap akhir pekan, Arif memanen sayur segar, selada, sawi, dan bayam hijau untuk dikirim ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari sana, sayur-sayur hasil panennya diolah menjadi menu sehat bagi anak-anak penerima program MBG di sekolah-sekolah sekitar. “Setiap minggu saya kirim sekitar 30 kilogram sayuran ke SPPG Klakah. Semua untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG,” tutur Arif sambil memeriksa kualitas daun bayam yang baru dipetik.

Sebelum mengenal SPPG, Arif biasa menjual hasil taninya ke beberapa pelaku usaha kuliner dan UMKM di Lumajang. Namun, sejak dapur MBG berdiri, pola tanam dan arah pemasaran berubah total. “Sekarang ada permintaan rutin. Setiap minggu pasti ada pengiriman. Jadi panen gak pernah mubazir,” katanya.

Kepastian pasar dari SPPG membuat Arif menata ulang strategi tanamnya. Ia kini membagi siklus panen menjadi mingguan agar suplai sayur tetap stabil. Pola ini membuatnya bisa memenuhi permintaan dapur MBG tanpa mengabaikan pelanggan lamanya. “Kami atur tanamnya bergiliran supaya tiap minggu bisa panen. Semua pelanggan tetap dapat jatah, termasuk dapur MBG,” ujarnya.

Dengan cara itu, usaha hidroponiknya menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Tak ada lagi masa kosong tanpa panen, dan pemasukan pun mengalir konsisten tiap akhir pekan. “Bangga rasanya, hasil panen saya bisa ikut memberi gizi untuk anak-anak sekolah di Lumajang. Jadi bukan cuma jualan, tapi juga berbuat sesuatu yang bermanfaat,” ujarnya.

Melalui program MBG, pemerintah daerah menyiapkan dapur khusus bernama SPPG, tempat berbagai bahan pangan lokal diolah menjadi makanan sehat untuk anak sekolah. Di dapur itu, semua bahan diambil dari petani dan pelaku usaha kecil sekitar, mulai dari sayuran, telur, ikan, hingga buah-buahan. Rantai pasok lokal seperti ini membuat ekonomi desa ikut hidup. Petani mendapatkan pasar yang pasti, pelaku kuliner terbantu, dan anak-anak mendapatkan gizi yang baik.

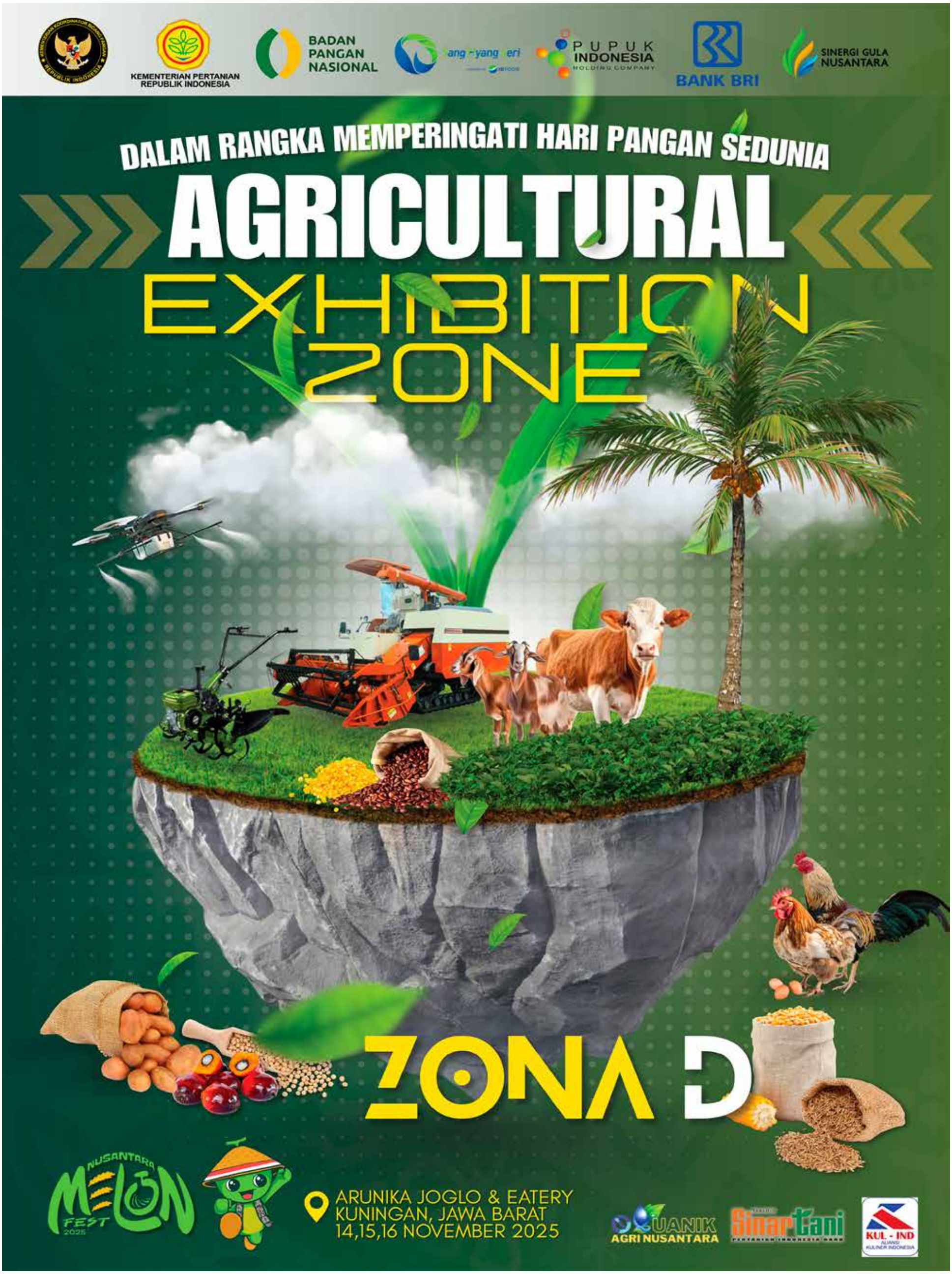
Berkat peningkatan permintaan, Arif kini mempekerjakan dua orang tetangga untuk membantu memanen dan mengemas sayuran. Setiap akhir pekan, mereka bekerja bersama menyiapkan pesanan yang akan dikirim ke dapur SPPG Klakah.

Ia menyebut, kolaborasi seperti ini bisa menjadi model pemberdayaan ekonomi desa yang berkelanjutan. Dengan dukungan pasar dari program MBG, petani muda bisa terus tumbuh tanpa takut kehilangan pembeli.

Inovasi SPPG Lumajang membuktikan program pemenuhan gizi dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa. Setiap kilogram sayur yang dikirim Arif ke dapur MBG bukan hanya bahan makanan, tapi juga simbol harapan bahwa anak-anak tumbuh sehat dan petani hidup sejahtera. “Kalau anak-anak sehat dan petani juga hidup layak, artinya desa maju. Dari dapur gizi, ekonomi ikut berputar,” ujar Arif.

Bagi Arif, pendekatan seperti ini perlu diperluas ke daerah lain. Dengan melibatkan petani lokal dalam rantai suplai pangan bergizi, manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan berkelanjutan. Program MBG bukan sekadar peluang bisnis, melainkan bentuk gotong royong modern antara petani, pemerintah, dan masyarakat. **Gsh/Yul**




KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PANGAN NASIONAL
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY
BANK BRI
SINERGI GULA NUSANTARA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PANGAN SEDUNIA
AGRICULTURAL EXHIBITION ZONE
ZONA D
NUSANTARA MELON FEST 2025
ARUNIKA JOGLO & EATERY
KUNINGAN, JAWA BARAT
14,15,16 NOVEMBER 2025
UANIK AGRI NUSANTARA
Sinartani
KUL - IND



1 Tahun Kabinet Merah Putih, Pangan Melesat

Memperingati satu tahun Kabinet Merah Putih, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif. Bahkan target swasembada pangan yang semula direncanakan tercapai dalam waktu empat tahun, berhasil diwujudkan hanya dalam satu tahun.

Klaim tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10). Jika melihat catatan, maka data resmi menunjukkan produksi nasional dan indikator kesejahteraan petani berada pada posisi cukup baik.

Pertama, produksi beras tertinggi: produksi nasional Januari–Oktober 2025 mencapai 31.338.197 ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. kedua, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Maksimal. Terlihat dari stok beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton (Juni 2025).

Ketiga, Nilai Tukar Petani (NTP) Meningkat: NTP mencapai 124,36, tertinggi. Keempat, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk pembelian Gabah Kering Panen naik. Pemerintah menetapkan harga beli gabah menjadi Rp6.500/kg. Kelima, deregulasi pupuk. Pemerintah menghapus 145 aturan tidak efisien, mempercepat distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.

“Ini prestasi besar yang sangat membanggakan. Ini adalah produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Jadi boleh kita tegakkan kepala kita dengan penuh kehormatan, saya semula memberi waktu empat tahun untuk kembali swasembada, tapi tim pangan kita berhasil mencapainya hanya dalam satu tahun,” kata Prabowo.

Presiden menyampaikan, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pertanian dan tim pangan nasional yang telah menjalankan berbagai langkah strategis, mulai dari deregulasi kebijakan, intensifikasi lahan, hingga pengamanan ekosistem produksi pangan.

“Di bidang pangan ini salah satu prestasi kita yang sangat melegakan kita. Saya memberi waktu empat tahun untuk kita kembali swasembada, ternyata tim pangan kita berhasil, insyaallah swasembada dalam satu tahun,” tegasnya.

Salah satu langkah kunci dalam lompatan produksi ini adalah reformasi tata kelola pupuk nasional. Pemerintah memangkas 145 regulasi lama yang menghambat distribusi dan menggantinya dengan sistem baru, pupuk langsung dari pabrik ke petani, tanpa birokrasi berbelit. “Jadi, tandatangan-tandatangan kita kurangin karna tanda tangan ini sumber masalah. Sekarang ini jadi kita ringkaskan semua,” ucap Presiden.

Tantangan Konversi Lahan

Namun Prabowo mengakui, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya produksi pangan. Saat ini hampir 100 ribu ha sawah hilang setiap tahun karena alih fungsi, lahan dibeli, menjadi kawasan industri, perumahan, atau real estate.

“Pabrik dan pembangunan memang kita butuhkan, tapi kalau lahan subur terus berkurang, dari mana kita akan mengamankan pangan? Karena itu, kita harus segera mencetak sawah baru. Alhamdulillah, program ini sudah mulai berjalan, dan mudah-mudahan akhir tahun depan kondisi pangan kita akan semakin aman,” kata Presiden.

Program pencetakan sawah baru juga menjadi prioritas. Hingga Oktober 2025, telah tercatat 225 ribu ha sawah baru, dan ditargetkan mencapai 480 ribu ha pada akhir 2026. Langkah ini diambil untuk menggantikan lahan pertanian produktif yang setiap tahun berkurang akibat alih fungsi lahan.

Hingga saat ini, Presiden Prabowo mengatakan intensifikasi lahan sawah eksisting juga terus dilakukan melalui program pompanisasi nasional, yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara signifikan. “Sekarang pupuk lancar, benih lancar, air lancar dengan intervensi langsung dari pemerintah. Kita pastikan seluruh ekosistem produksi beras berjalan aman dan efisien,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti pentingnya infrastruktur pascapanen dalam menjaga ketahanan pangan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah kini tengah menyiapkan pembangunan 100 gudang baru Bulog dalam waktu sesingkat-singkatnya. “Saudara-saudara, sekarang masalahnya kita kekurangan gudang. Kita sudah siapkan dananya, dan Bulog akan segera membangun 100 gudang baru agar distribusi dan penyimpanan beras semakin kuat dan efisien,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan, keberhasilan ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan keberanian dalam mengambil langkah-langkah reformasi di sektor pangan. Reformasi tersebut tidak hanya mendorong kemandirian pangan, tetapi juga menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di tengah ketidakpastian global.

Keberhasilan mencapai swasembada pangan dalam satu tahun menunjukkan bahwa sektor pertanian kini menjadi fondasi utama ekonomi nasional. Dengan sistem yang lebih efisien, produktif, dan berkeadilan bagi petani, Indonesia membuktikan kemampuannya untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengakui, capaian luar biasa sektor pertanian merupakan hasil nyata dari kepemimpinan Presiden Prabowo yang berpihak pada petani. Berbagai kebijakan strategis yang dijalankan pemerintah telah mampu meningkatkan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat cadangan pangan nasional. “Ini berkat kebijakan Presiden Prabowo yang selalu pro petani, sehingga saat ini petani kita makin sejahtera dan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi pangannya,” kata Amran.

Amran juga menyampaikan bahwa capaian positif tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Ia menambahkan, Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. “Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas,” ujarnya.

Direktur Eksekutif IndoStrategi, Arif Nurul Imam mengatakan, publik menilai sektor pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Berbagai program strategis seperti percepatan tanam, perluasan irigasi, distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran, hingga penguatan cadangan pangan nasional dinilai berdampak langsung pada masyarakat.

“Di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan dunia, kebijakan pertanian yang berorientasi pada produksi dan kesejahteraan petani terbukti memberi dampak nyata,” tuturnya. **Yul**

Mata Ikan Tuna, **Potensi Besar Sumber Gizi Kaya DHA**



Mata ikan tuna yang selama ini hanya menjadi limbah industri ternyata menyimpan potensi besar sebagai sumber gizi. Bagian ini mengandung Omega-3, khususnya DHA, yang sangat bermanfaat bagi perkembangan otak dan kesehatan tubuh.

Melihat peluang tersebut, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University, Prof Wini Trilaksani, mengembangkan inovasi suplemen kesehatan "Vita Docosa" dari ekstrak mata ikan tuna.

Prof Wini menjelaskan, Vita Docosa dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Kehadiran suplemen ini diharapkan mampu membantu menekan angka *stunting* yang masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

"Vita Docosa merupakan suplemen kesehatan dari limbah mata ikan tuna dengan kandungan Omega-3, khususnya EPA dan DHA," ujarnya seperti dikutip dari laman IPB University.

Inovasi ini, lanjut dia, lahir dari keprihatinan atas tingginya impor Omega-3 di Indonesia. Selama ini pasar suplemen masih dibanjiri produk luar negeri, sementara dari dalam negeri nyaris tidak ada. "Kalau pun ada, bahan bakunya juga impor," ujarnya.

Hasil penelitian, umumnya hanya 40–60 persen bagian ikan tuna yang dimanfaatkan industri. Sisanya menjadi limbah, termasuk mata tuna. Padahal, kandungan DHA pada mata tuna bisa mencapai 32–38 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan ikan impor seperti salmon dan kod yang hanya sekitar 12–17 persen. "Minyak mata tuna ini tidak perlu lagi dikonsentratkan. Dengan sedikit proses pemurnian, kadar DHA sudah bisa mencapai 40 persen," jelasnya.

Keunggulan

Vita Docosa hadir dengan sejumlah keunggulan. Selain berbahan baku lokal dan diproduksi secara higienis, suplemen ini juga memiliki harga yang kompetitif dibandingkan produk impor. Kandungan di dalamnya meliputi Omega-3 (EPA dan DHA), *virgin coconut oil,* minyak ikan, serta vitamin E. Dengan mengonsumsi dua kapsul per hari, kebutuhan DHA harian sesuai angka kecukupan gizi (AKG) dapat terpenuhi.

Selain untuk mendukung perkembangan otak, DHA juga bermanfaat bagi kesehatan retina mata, menjaga fungsi jantung, membantu metabolisme tubuh, hingga meningkatkan daya ingat. Karena itu, Vita Docosa tidak hanya baik untuk anak-anak, tetapi juga bermanfaat bagi semua kalangan yang membutuhkan asupan gizi optimal.

Prof Wini berharap, Vita Docosa dapat menjadi alternatif sumber gizi yang terjangkau dan menjadi solusi nyata dalam upaya mengatasi stunting. "Indonesia memiliki laut yang luas dengan hasil perikanan melimpah. Sudah seharusnya kita bisa memanfaatkan potensi lokal untuk kesehatan dan kecerdasan generasi bangsa," katanya.

Ia menambahkan, *stunting* bukan hanya masalah anak bertubuh pendek, tetapi juga berhubungan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan DHA menjadi salah satu faktor utama. "Yang kita khawatirkan, anak-anak stunting nantinya juga memiliki kemampuan kognitif rendah. Itu berdasarkan hasil penelitian, salah satunya karena kurang asupan DHA," tutur Prof Wini.

Yul

Komersialisasi E-PAPER Sinartani

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersil dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



Tabloid Sinartani Tabloid sinartani.com SINTA TV

BERLANGGANAN
E-paper Tabloid Sinartani

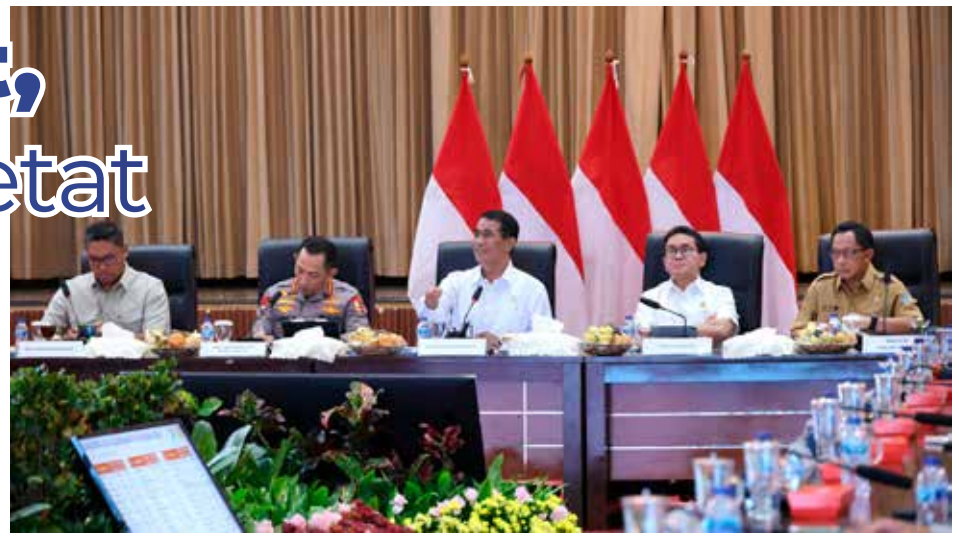
Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

www.tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV

OP Beras Berlanjut, Pengawasan Diperketat



Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga beras nasional melalui langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga. Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (20/10), Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman, sementara langkah pengawasan dan operasi pasar akan diperkuat di seluruh daerah.

Amran yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan, dalam dua pekan ke depan, pemerintah akan mengintensifkan operasi pasar. Stok beras nasional saat ini berkisar 3,8 juta ton, termasuk 1 juta ton lebih untuk operasi pasar SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) hingga Januari-Februari 2026.

"Harga beras secara nasional mulai turun. Tetapi dalam Ratas terakhir, Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita semua agar harga turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar," kata Mentan Amran dalam rapat yang dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Kapolri, Dirut Bulog, dan jajaran di Jakarta, Senin (20/10).

Ia mengungkapkan, operasi pasar akan bergerak paralel dengan pengawasan terhadap distributor ataupun pengecer beras di seluruh Indonesia. Sejumlah pihak termasuk Dikrimsus, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas terkait, dan Perum Bulog akan berkolaborasi untuk melakukan pemantauan ini. "Kata kuncinya, Bapak Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan penguatan pengawasan dan intervensi pasar," ujarnya.

Tidak main-main, pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi distributor ataupun pengecer yang masih menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) ataupun tidak sesuai dengan mutu. "Kami imbau distributor, pedagang, pengecer seluruh Indonesia, tolong patuhi regulasi yang ada yaitu mengikuti HET. Kalau masih ada yang melanggar, harganya di atas HET kemudian label tidak sesuai mutu, dengan segala kerendahan hati, kami berikan surat teguran, kalau tidak diindahkan izinnya bisa dicabut," tegas Amran.

HET Beras Medium dan Premium

Zona	Beras Medium	Beras Premium
Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi)	Rp 13.500/kg	Rp 14.900/kg
Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan)	Rp 14.000/kg	Rp 15.400/kg
Zona 3 (Maluku dan Papua)	Rp 15.500/kg	Rp 15.800/kg

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan, saat ini kenaikan harga beras terjadi di 59 kabupaten/kota dari sebelumnya pernah tercatat di 233 kabupaten/kota. Ia mendukung langkah penuh untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar dan penyaluran beras SPHP.

Menurutnya, pada Agustus lalu kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Tapi dengan operasi pasar yang dikerjakan bersama sehingga akhirnya tinggal 59 kabupaten/kota. Untuk itu, ia meminta operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya," terangnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang turut hadir dalam Rapat Koordinasi mengungkapkan bahwa kepolisian terus bergerak untuk menindak pelaku penyelewengan beras tidak sesuai HET dan standar mutu. Tercatat, sudah ada 31 laporan polisi yang masuk dan telah ditetapkan 41 tersangka.

Sesuai kebijakan Presiden, pihaknya akan melihat tindakan penegakan hukum efektif untuk mengendalikan produsen beras. Bahkan akan terus memastikan agar tidak ada lagi permainan dengan harga dan mutu beras. "Satgas Pangan bersama Dikrimsus kerja sama dengan Dinas dan Kepala Pasar untuk cek langsung bila ada harga naik agar bisa ditindak," tegasnya. **Yul**

Indonesia Masuk Daftar Rekognisi FAO

Indonesia masuk dalam daftar penerima rekognisi Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) atas kontribusi Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam pembangunan sektor pangan dan pertanian dunia.

Penghargaan diserahkan pada acara Global Technical Recognition Ceremony di Kantor Pusat FAO, Roma, Italia, Rabu (15/10), dalam rangka peringatan 80 tahun FAO. Indonesia menjadi salah satu dari 18 penerima rekognisi KSST pada dua kategori Country-Level Recognition dan Institutional-Level Recognition.

Pada kategori Country-Level, FAO mengapresiasi peran Indonesia dalam mendorong transformasi pertanian dan ketahanan pangan global melalui program KSST yang selaras dengan FAO Strategic Framework 2022–2031 dan visi "Four Betters" (better production, better nutrition, better environment, better life).

Selama dua dekade terakhir, Kementerian Pertanian telah mengimplementasikan inisiatif KSST untuk 74 negara, dengan mengirimkan 190 tenaga ahli, 400 alat dan mesin pertanian, 5.000 dosis semen beku, serta memberikan pelatihan bagi lebih dari 1.500 peserta dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik. Indonesia juga mendirikan pusat pelatihan regional di Tanzania, Gambia, dan Fiji serta mendukung pemulihan produksi pangan di Madagaskar dan Sudan.

Pada kategori Institutional-Level, penghargaan diberikan kepada Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagai Centre of Excellence dalam reproduksi ternak. BBIB Singosari menyuplai lebih dari 60% semen beku nasional, membuka ribuan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai ekonomi peternakan nasional. Secara internasional, BBIB Singosari telah melatih lebih dari



300 profesional dari 36 negara dan menjalin kerja sama dengan JICA dan Islamic Development Bank (IsDB).

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Ali Jamil, mengungkapkan penghargaan ini adalah sebuah simbol dari dunia InteRnasional bahwa Indonesia telah bertransformasi menjadi solusi bagi pertanian di dunia. "Penghargaan ini merupakan pengakuan dunia atas peran strategis Indonesia sebagai penyedia solusi pertanian bagi negara berkembang. Indonesia telah bertransformasi dari penerima menjadi penyedia teknologi, tenaga ahli, dan inovasi pertanian global, seraya berkontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dunia," ungkap Ali Jamil. **Yul**

Dunia Soroti **Kesejahteraan Hewan dalam Beternak**

Isu kesejahteraan hewan kini menjadi perhatian serius dalam perdagangan ternak dunia. Karena itu, pelaku usaha harus mulai memperhatikan cara beternak yang memenuhi prinsif tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian tengah menyusun regulasi terkait kesejahteraan hewan dalam beternak.



Aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama disetiap tahap rantai produksi peternakan (dari farm sampai dengan meja makan). Agar terpenuhinya aspek keamanan pangan dalam pemeliharaan ayam petelur perlu memperhatikan hal-hal seperti pemberian pakan, perkandangan, pengendalian penyakit, pelaksanaan biosekuriti, dan pemahaman terkait perilaku unggas.

Penerapan kesejahteraan hewan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pasal 66 dan 67. Penjelasan selanjutnya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan pasal 83 - 96.

Kesejahteraan hewan saat ini memang menjadi isu penting yang menjadi perhatian publik dan merupakan tuntutan persaingan perdagangan global yang tidak bisa dihindari. Walaupun demikian kesejahteraan hewan bukan merupakan syarat wajib dalam ketentuan WTO, tetapi kesejahteraan hewan dapat digunakan suatu negara dalam melakukan pembatasan perdagangan internasional.

Bahkan isu-isu kesejahteraan hewan terkait kesejahteraan ayam petelur semakin meningkat akhir-akhir ini. Karena itu saatnya Indonesia berbenah memperbaiki penerapan kesejahteraan hewan yang diawali dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dan mengikuti pedoman yang ada agar dapat meningkatkan produktifitas dan daya saing produk.

Pemerintah saat ini terus mendorong praktik peternakan unggas yang berorientasi pada kesejahteraan hewan. Salah satu langkah nyata adalah dukungan terhadap sistem budidaya ayam petelur bebas sangkar atau *cage-free system*, yang dinilai lebih ramah terhadap hewan dan berkelanjutan.

Ketua Tim Kerja Advokasi Kesejahteraan Hewan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner (Ditkesmavet) Kementerian Pertanian, drh. Puguh Wahyudi, M.Si mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan, yang akan menjadi payung hukum baru di bidang ini.



"Regulasi ini sudah dalam tahap harmonisasi dan siap disahkan. Nantinya akan menjadi landasan hukum standar kesejahteraan hewan di Indonesia, mencakup hewan ternak, hewan kesayangan, hewan jasa, hingga hewan laboratorium," kata Puguh.

Lebih lanjut ia menambahkan aturan ini juga mengatur sertifikasi kesejahteraan hewan yang bisa menjadi panduan bagi peternak dalam mengembangkan sistem pemeliharaan yang lebih ramah hewan, termasuk untuk ayam petelur.

Tren Global

Puguh menegaskan, pemerintah siap mendukung para peternak yang mulai beralih ke sistem cage-free. Langkah ini sejalan dengan tren global yang terus bergerak ke arah praktik peternakan beretika dan berkelanjutan. "Uni Eropa sudah 100 persen beralih ke sistem cage-free. Dampaknya akan terasa pada perdagangan internasional, sehingga Indonesia juga harus siap," ujar ya.

Apalagi, lanjut Puguh, WTO pernah memutuskan bahwa isu kesejahteraan hewan bisa menjadi dasar hambatan perdagangan jika dianggap menyangkut moral publik. "Artinya, kita tidak bisa tertinggal," tegasnya.

Sebenarnya tren internasional menunjukkan pergeseran besar menuju sistem cage-free sejak 2015. Sustainable Poultry Program Manager Indonesia Lever Foundation, Sandi Dwiyanto menjelaskan, perhatian publik dan dunia usaha terhadap kesejahteraan hewan meningkat tajam.

Hingga akhir 2021, lebih dari 2.000 perusahaan global, termasuk restoran, hotel, dan ritel telah berkomitmen menggunakan telur cage-free. Di Indonesia sendiri, sekitar 100 perusahaan sudah mengumumkan langkah serupa. Beberapa perusahaan besar yang berkomitmen antara lain Nestlé, KFC, Pizza Hut, Burger King, Taco Bell, dan The Coffee Bean & Tea Leaf, yang menargetkan penggunaan telur cage-free sepenuhnya pada 2025.

Sementara di dalam negeri, jaringan ritel Superindo berkomitmen menyediakan 100 persen telur *cage-free* di rak mereka. Kemudian, disusul kafe dan restoran seperti Ismaya Group, Bali Buda, dan Jiwa Jawi yang mulai menerapkan kebijakan serupa.

Lever Foundation adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) global dengan staf di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Latin. Organisasi ini bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terkemuka membantu membangun rantai pasok pangan yang lebih manusiawi, aman, dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan sumber protein hewani dan pengembangan pangan berbasis nabati.

Pemilik PT Inti Prima Satwa Sejahtera (IPSS), Roby Tjahya Dharma Gandawijaya, optimistis prospek pasar telur cage-free di Indonesia akan terus tumbuh. Namun, ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor. "Keberhasilan sistem cage-free tidak bisa dicapai sendiri. Kita perlu dukungan dari semua pihak, dari mulai industri pakan, DOC, peralatan, hingga obat-obatan. Dengan kolaborasi, kita bisa menyiapkan diri sejak dini menghadapi perubahan global ini," ujarnya.

Selain ramah hewan, sistem cage-free juga terbukti lebih aman dari sisi kesehatan pangan. *European Food Safety Authority* (EFSA) mencatat, risiko *salmonella* pada sistem kandang baterai jauh lebih tinggi dibandingkan sistem cage-free.

Hal ini menegaskan bahwa perubahan ke arah cage-free bukan hanya tren, tapi juga langkah strategis menuju keamanan pangan yang lebih baik. Dengan dukungan regulasi baru dan meningkatnya kesadaran industri, masa depan peternakan ayam petelur Indonesia kian terbuka menuju sistem yang lebih beretika, sehat, dan berkelanjutan.**Herman/Yul**

Lima Prinsip Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan ayam petelur diterapkan dengan memperhatikan lima prinsip kebebasan hewan atau yang dikenal dengan five freedom. Lima prinsip kebebasan hewan tersebut adalah :

1. Bebas dari lapar dan haus serta malnutrisi; mendapatkan akses air minum (add libitum) dan pakan yang cukup sesuai dengan kebutuhan fisiologis ayam petelur.
2. Bebas dari rasa tidak nyaman; hal ini diterapkan dengan memberikan situasi lingkungan yang sesuai termasuk tempat tinggal yang istirahat yang nyaman.
3. Bebas dari sakit, cedera, dan penyakit; melakukan pencegahan, diagnosa, dan pengobatan yang tepat.
4. Bebas dari rasa takut dan stress; menghindarkan dan memastikan ayam petelur terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan penderitaan bagi ayam.
5. Bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami; menyediakan ruangan yang cukup, fasilitas yang memadai sesuai dengan bangsa ayam.